PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

RENSTRA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2025-2029



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menjabarkannya kedalam rencana strategis perangkat daerah;

b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merujuk pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah serta program dan kebijakan yang lebih luas, sehingga setiap tingkatan pembangunan terintegrasi dan saling mendukung;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

(2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah yang disusun merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I berisi tentang pendahuluan;
   b. bab II berisi tentang gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
   c. bab III berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
   d. bab IV berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. bab V berisi tentang penutup.

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Pertanian dan Pangan;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
o. Dinas Pemuda dan Olahraga;
p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
r. Dinas Peternakan dan Perikanan;
s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
t. Sekretariat Daerah;
u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
y. Inspektorat;
z. Kecamatan Trenggalek;
aa. Kecamatan Panggul;
bb. Kecamatan Suruh;
cc. Kecamatan Durenan;
dd. Kecamatan Pogalan;
ee. Kecamatan Watulimo;
ff. Kecamatan Tugu;
gg. Kecamatan Dongko;
hh. Kecamatan Kampak;
ii. Kecamatan Munjungan;
jj. Kecamatan Pule;
kk. Kecamatan Gandusari;
ll. Kecamatan Bendungan;
mm. Kecamatan Karangan; dan

nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 42) dinyatakan berakhir periodesasinya; dan
b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 13) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu kewajiban tersebut adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan guna mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

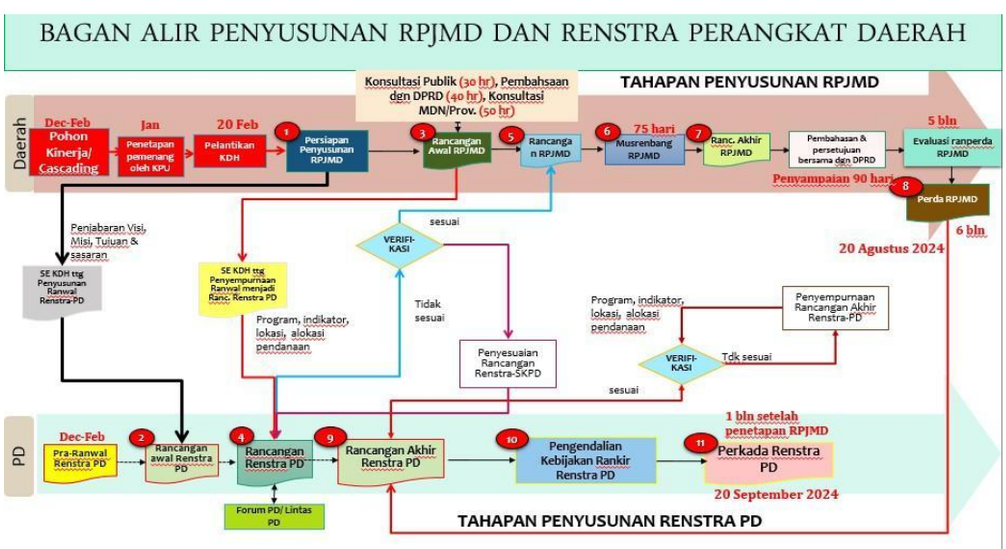
Renstra merupakan suatu instrumen kepemimpinan dan merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu “Apa yang akan diperbuat”. Sebagai suatu proses, Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijakan organisasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Renstra ini merupakan implementasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sesuai TUPOKSI-nya.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana Renstra Dinas Pertanian dan

Pangan ini menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan. Oleh karenanya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan ini diharapkan menjadi sebuah rencana yang dicirikan dengan : 1) dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan, 2) efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil; 3) komprehensif, yang diindikasikan dengan adanya sinergitas dan konsistensi perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauhmana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsistensi menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberkelanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu; 4) partisipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki; 5) transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun dengan berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Renstra ini disusun dengan memadukan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan



rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Trenggalek Periode 2025-2029 yang menjadi tupoksi dari Dinas Pertanian dan Pangan. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini merupakan dokumen perencanaan yang menerjemahkan visi dan misi Bupati dengan tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan dan diterjemahkan lagi menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas di setiap tahunnya. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2025 – 2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor dalam mendukung target pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang terintegrasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2025 - 2029 adalah :

a. Landasan idiil Pancasila;

b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

c. Landasan operasional meliputi :

   1. Pasal 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

   2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024- 2045;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
35. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 24).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Trenggalek disusun dengan maksud sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah pada level perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Maksud utama penyusunan Renstra adalah:

1. Pedoman lima tahunan Dinas Pertanian dan Pangan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Trenggalek Periode 2025-2029 ke dalam strategi, program, dan kegiatan yang operasional serta terukur.
2. Menjadi pedoman Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode perencanaan, sehingga kegiatan yang dilakukan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan RPJMD.
3. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan lintas sektor di Kabupaten Trenggalek agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun kegiatan.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dengan menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas.
5. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan karena capaian Renstra akan menjadi bahan evaluasi kinerja tahunan maupun akhir periode.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan secara umum adalah menyediakan pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama lima tahun dan menjadi pedoman dalam mengarahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Secara terperinci tujuan penyusunan renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah:

1. Dokumen perencanaan lima tahunan yang mengarahkan Dinas Pertanian dan Pangan dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Memberikan arahan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang lebih rinci, sehingga ada kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 - 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanian dan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pertanian dan Pangan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pertanian dan Pangan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode

sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya, serta bagaimana capaian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi ke depan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan

Memuat pihak atau segmen masyarakat yang secara langsung menjadi target penerima manfaat dari program atau kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan. Identifikasi ini penting untuk menyusun strategi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang efektif dan inklusif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2.2.2. Isu Strategis

Menjabarkan isu-isu penting yang memerlukan perhatian dan penanganan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor pertanian dan pangan.

Penjabaran permasalahan dan isu strategis ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja yang efektif dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian dan pangan di Kabupaten Trenggalek.

BAB III : **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dan juga tentang arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, beserta hasil-hasil utama yang ditargetkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sebagai dasar penyusunan program, indikator kinerja, dan pengalokasian dana anggaran.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dan juga tentang arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, beserta hasil-hasil utama yang ditargetkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sebagai dasar penyusunan program, indikator kinerja, dan

pengalokasian dana anggaran.

3.3. Strategi Dinas Pertanian dan Pangan Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pertanian Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB IV : **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Uraian Program

Pada bagian ini dikemukakan rumusan program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

4.2. Uraian Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rumusan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan menengah Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU)

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU)

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kunci (IKK)

Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kunci (IKK)

BAB IV : **PENUTUP**

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian dan Pangan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, mengamanatkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- pembinaan UPTD;
- pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- penyusunan perjanjian kinerja;
- penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

- pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. **Sekretariat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Adapun tugas Sekretariat mempunyai sebagai berikut :

a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
b. mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang Urusan Pemerintahan daerah, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ini memiliki tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
h. menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Dinas;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda dan keterampilan pada sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris.

2. **Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Bidang Ketahanan Pangan mempunya tugas :

a. menyusun program kerja bidang ketahanan pangan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan;
c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang ketahanan pangan;
d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
e. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah;
f. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
g. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;
h. melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
i. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
j. melaksanakan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

daerah;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;

b. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan, dan mikro organisme di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Perkebunan**

Bidang perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perkebunan mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja bidang perkebunan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;

b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah bidang perkebunan;

c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perkebunan;

d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang perkebunan;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan, dan mikro organisme di bidang perkebunan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang perkebunan;

g. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di bidang perkebunan;

h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tanaman semusim, tanaman tahunan dan perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perkebunan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. **Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Pertanian**

Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun program kerja bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;

b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;

c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;

d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian;

f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyuluhan, sarana pertanian dan prasarana pertanian;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian; dan

o melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional**

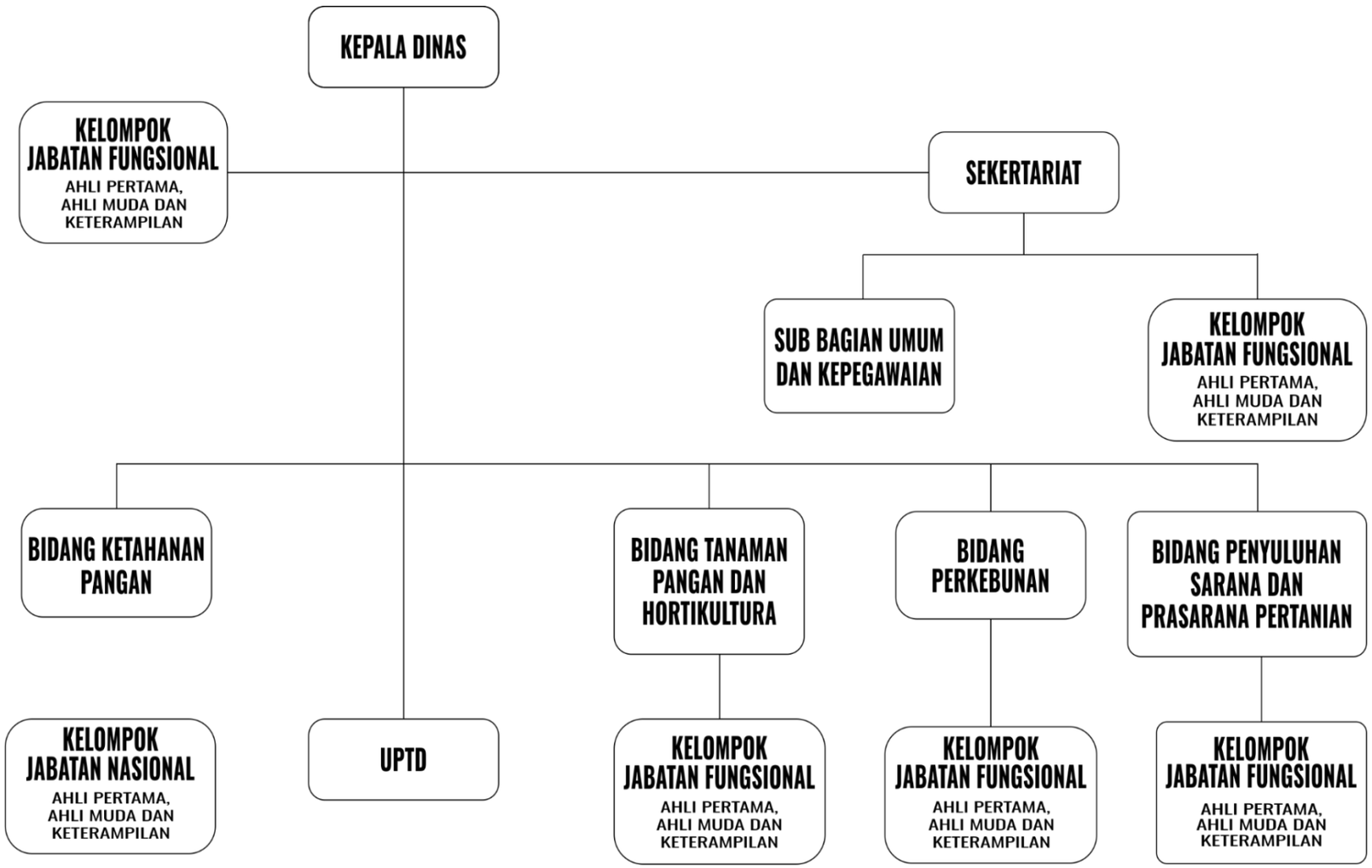
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok jabatan

fungsional ahli madya dan ahli utama bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari ahli pertama, ahli muda dan keterampilan pada bidang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

7. **UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek memiliki sumber daya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

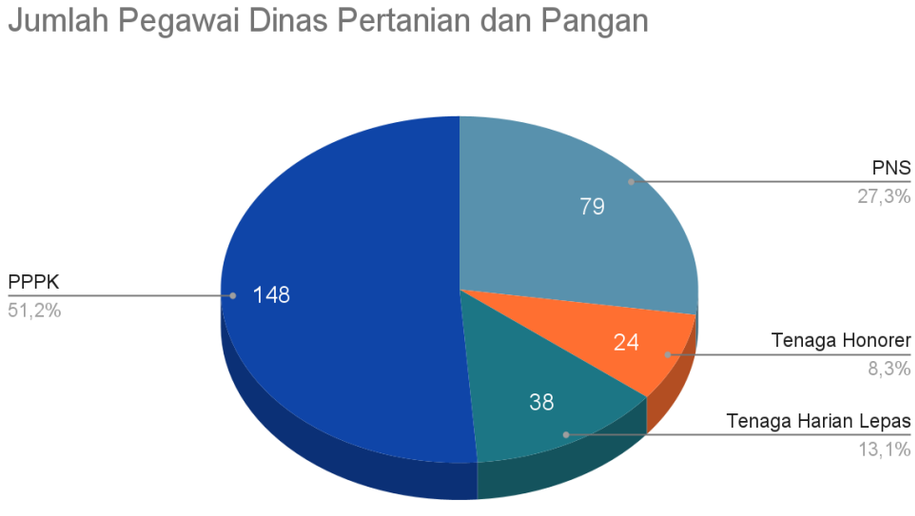
a. Sumber Daya Aparatur

Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS	79 Orang
2	CPNS	0 Orang
3	Tenaga Honorer	24 Orang
4	Tenaga Harian Lepas	0 Orang
5	PPPK	148 Orang

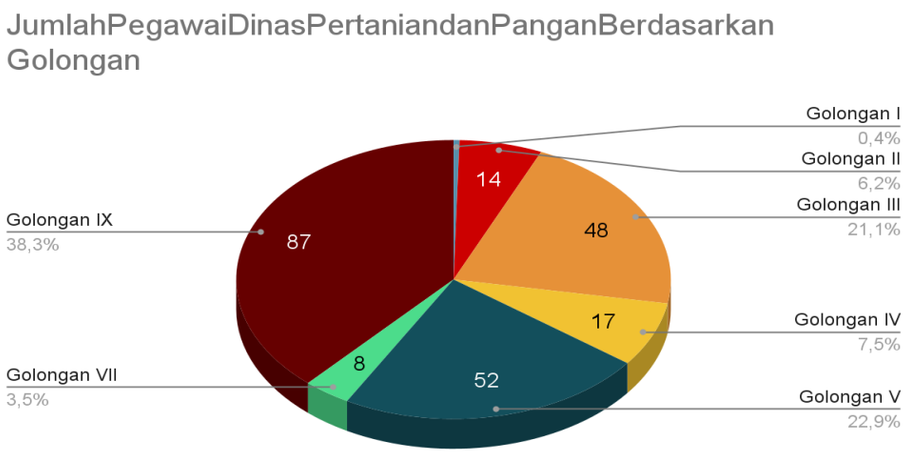
Grafik 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek



Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan I (PNS)	1 Orang
2	Golongan II (PNS)	14 Orang
3	Golongan III (PNS)	48 Orang
4	Golongan IV (PNS)	17 Orang
5	Golongan V (PNS)	52 Orang
6	Golongan VII (PNS)	8 Orang
7	Golongan IX (PNS)	87 Orang

Grafik 2.2.
Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Golongan

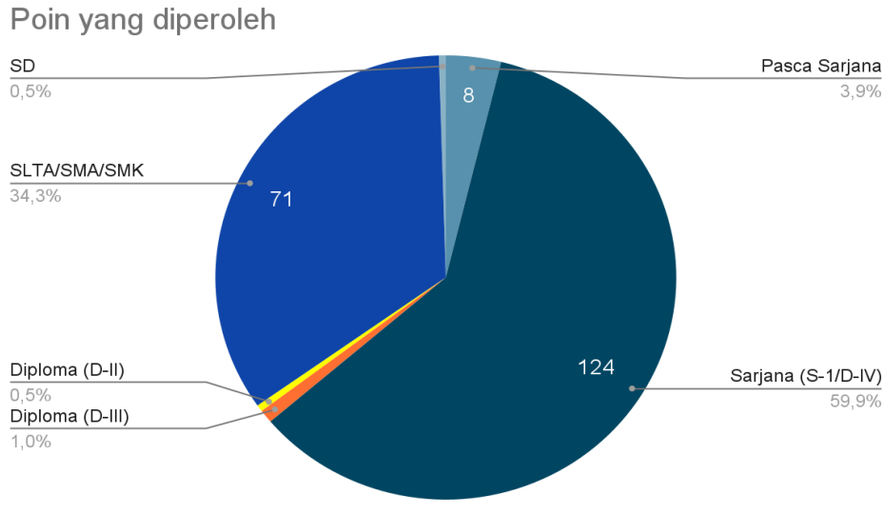


Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Pasca Sarjana	19 Orang
2	Sarjana (S-1/D-IV)	124 Orang
3	Diploma (D-III)	12 Orang
4	Diploma (D-II)	1 Orang
5	SLTA/SMA/SMK	71 Orang
6	SLTP/SMP	0 Orang
7	SD	1 Orang

Grafik 2.3.

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1), dapat dirinci sebagai berikut (*Sumber: Pengelola Barang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2024*):

Tabel 2.4.
Jumlah Sumber Daya yang Dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Trenggalek

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	TANAH	16 Bidang
2	PERALATAN DAN MESIN	7.199 Buah
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	179 Paket
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	901 Paket
5	ASSET TETAP LAINNYA	240 Satuan

Dinas Pertanian dan Pangan mengelola beberapa unit usaha yang masih operasional diantaranya adalah Trenggalek Agropark dan Rumah Coklat.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan didasarkan pada 1 (satu) Tujuan, yaitu Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian, dengan Indikator Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB). PDRB

adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Jika Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat, maka hal ini bisa menunjukkan bahwa produktivitas sektor ini meningkat, atau harga komoditas sedang naik.

Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan adalah 1). Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dengan Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, 2). Meningkatnya kesejahteraan petani dengan Indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan; 3). Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan. Terdapat 2 Indikator pada Sasaran ini, yaitu a). Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi. Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Pemerintah Daerah sampai Organisasi Perangkat Daerah. Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*); dan b). Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah suatu alat atau metode yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi pelayanan publik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. SKM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik serta menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan. Nilai SKM diperoleh dari Aplikasi SKM (https://skm.trenggalekkab.go.id/) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) yang bisa dicapai mulai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Nilai Tukar Petani yang dicapai Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (NTP)	102,09	102,57	102,40	103,58	103,65

Tabel 2.6
Survey Kepuasan Masyarakat yang dicapai Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	83,70	84,75	99,36	99,77

Tabel 2.7
Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dicapai Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	82,18	86,04	87,29	89,49

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ditekankan pada Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Adapun produksi tanaman pangan yang bisa dicapai mulai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Produksi Tanaman Pangan yang dicapai Tahun 2020-2024

KOMODITAS	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	163.807,00	164.743,90	160.383	153.126	138.357
Jagung	104.260	117.698	114.213	120.995	116.240
Kedelai	1.721	3.605	2.899	3.183	1.697
Ubi Kayu	135.206	285.804	169.994	98.850	179.774

Pada Tahun 2024 produksi pertanian tanaman pangan untuk padi dengan hasil produksi mencapai 138.357 ton, jagung mencapai 116.240 ton, kedelai mencapai 1.697 ton, Ubi Kayu mencapai 179.774 ton. Wilayah penghasil produksi tertinggi untuk komoditas padi ada di Kecamatan Panggul, produksi jagung tertinggi ada di Kecamatan Tugu, produksi kedelai tertinggi ada di Kecamatan Durenan dan ubi kayu di Kecamatan Tugu.

Tanaman hortikultura ditekankan pada peningkatan produksi untuk pemenuhan kebutuhan pasar dengan upaya penerapan IndoGAP,

GHP, GMP, perbaikan kebun, penerapan/alih teknologi maupun penggunaan benih bermutu varietas unggul maupun pemberdayaan petani / pelaku usaha perkebunan melalui bantuan sarana prasarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan petani. Dalam rangka pengenalan produk dan promosi varietas unggul lokal hortikultura Trenggalek dilakukan berbagai kegiatan seperti kontes durian, pameran produk hortikultura dan pelepasan varietas.

Komoditas unggulan hortikultura di Kabupaten Trenggalek meliputi Durian, Manggis, Apokat, Bawang Merah, Cabai, dan Jahe. Adapun capaian produksi selama lima tahun komoditas hortikultura diantaranya adalah :

Tabel 2.9.
Produksi Hortikultura yang dicapai Tahun 2020-2024

KOMODITAS	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)	2023 (ton)	2024 (ton)
Durian	11.362,9	17.869,30	8.627,72	40.983,22	88.175,99
Manggis	2.835,2	3.059,23	3.476,69	3.506,11	24.295,90
Alpukat	3.062,80	3.958,37	4.811,26	3.227,40	10.809,22
Bawang Merah	527,30	1.037,00	549,30	533,33	475,67
Cabai	1.206,5	792,40	1.009,18	413,02	801,44
Jahe	1.360,11	1.761,02	1.025,24	1.411,65	3.311,62

BIDANG PERKEBUNAN

Kinerja Bidang Perkebunan meliputi komoditas Kelapa, Kakao, Kopi, Cengkeh, Nilam dan Tembakau, yang ditekankan pada capaian produksinya. Peningkatan capaian produksi tanaman perkebunan ditempuh dengan berbagai cara melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi tanaman perkebunan. Pemenuhan sarana dan prasarana pra dan pasca panen tanaman perkebunan menjadi titik utama kegiatan yang dilaksanakan. Upaya – upaya lain seperti peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi juga dilaksanakan melalui Sekolah Lapang Tanaman Perkebunan dan penanggulangan hama penyakit tanaman perkebunan. Adapun produksi tanaman perkebunan yang tercapai dalam kurun waktu lima tahun adalah :

Tabel 2.10.
Produksi Tanaman Perkebunan yang dicapai Tahun 2020-2024

KOMODITAS	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)	2023 (ton)	2024 (ton)
Kelapa	8.130,82	7.658,63	8.011,54	8.498,41	8.421,39
Cengkeh	601,64	607,54	610,83	612,80	1.434,53

KOMODITAS	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)	2023 (ton)	2024 (ton)
Kopi	293,96	320,55	309,57	364,18	364,67
Kakao	1.003,83	1.141,37	1.066,91	1.066,31	1.069,32
Nilam	1.650,81	2.520,35	1.557,90	2.038,33	1.237,72
Tembakau	89,43	79,59	64,64	107,54	179,01

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN

Dinas Pertanian dan Pangan berupaya penuh dalam pemenuhan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Trenggalek yang masih sangat banyak kekurangannya. Pemenuhan sarana dan prasarana ini ditempuh dari dana DAK, APBD maupun APBN yang bahu – membahu dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Trenggalek.

Pemenuhan sarana pertanian meliputi pengadaan alat pengolah tanah sampai dengan alat pasca panen pertanian dan pembangunan prasarana yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, pembangunan dan pemeliharaan Dam Parit / Perpipaan, pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik, Pembangunan Irigasi Air Permukaan, Pembangunan Irigasi Air Tanah, Rumah Pengerimg Tembakau, Greenhouse serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian lainnya dalam rangka peningkatan hasil pertanian dan peningkatan pendapatan petani serta pencapaian program prioritas sesuai dengan visi – misi Bupati terpilih.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan seluruh pihak yang berperan, berkepentingan, maupun menerima manfaat dari penyelenggaraan program, kegiatan, dan layanan di bidang pertanian dan pangan. Identifikasi kelompok sasaran dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan dapat tepat sasaran, efektif, dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian. Dengan pemetaan sasaran yang jelas, setiap program dan kegiatan dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, menghindari tumpang tindih intervensi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek meliputi :

a. Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kelompok petani tanaman pangan dan hortikultura mencakup petani yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ubi, serta komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, durian, manggis, alpukat, jahe, dan tanaman bernilai ekonomi lainnya.

Layanan yang diberikan:

- Bantuan benih unggul, pupuk dan pestisida
- Pendampingan teknis budidaya dan panen
- Penyuluhan dan pelatihan pertanian
- Pendampingan penerapan teknologi produksi
- Fasilitasi alsintan
- Fasilitasi prasarana pertanian hortikultura

b. Petani Perkebunan

Kelompok ini mencakup petani dan pelaku usaha tanaman tahunan maupun semusim perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, cengkeh, tembakau, nilam, serai, dan komoditas lainnya. Kelompok ini berperan dalam mendukung perekonomian daerah melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil, serta pengembangan rantai nilai komoditas perkebunan. Selain menjadi sumber pendapatan utama, kelompok ini juga berkontribusi terhadap daya saing daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produksi, serta penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan, menjadi prioritas dalam pengembangan pada sektor perkebunan di Kabupaten Trenggalek.

Layanan:

- Bantuan benih unggul, pupuk dan pestisida
- Pembinaan budidaya perkebunan
- Perlindungan tanaman dan pengendalian OPT
- Bantuan pasca panen dan pengolahan hasil
- Fasilitasi alsintan
- Fasilitasi prasarana perkebunan

c. Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Merupakan wadah kelembagaan petani di tingkat de sa/kecamatan. Poktan dan Gapoktan yang dimaksud adalah kelompok yang telah terdaftar dalam basis data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) milik Kementerian Pertanian. Melalui kelembagaan ini, diharapkan petani dapat lebih mandiri, inovatif, serta mampu mengembangkan usaha taninya secara berkelanjutan.

Layanan:

- Pembinaan, pendampingan manajemen kelompok dan usaha tani.

- Akses bantuan pupuk bersubsidi dan akses modal kepada lembaga keuangan
- Pendampingan penyusunan RDKK dan program penyuluhan.
- Bantuan benih unggul dan pupuk
- Pembinaan budidaya perkebunan
- Perlindungan tanaman dan pengendalian OPT
- Bantuan pasca panen dan pengolahan hasil
- Fasilitasi alsintan
- Fasilitasi prasarana perkebunan

d. Kelompok Wanita Tani (KWT)

Merupakan kelompok perempuan yang aktif dalam pengelolaan kegiatan pertanian keluarga maupun pekarangan. Kelompok Wanita Tani yang dimaksud, merupakan kelompok yang terdaftar dalam basis data oleh Kementerian Pertanian, yaitu Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Kelompok ini juga menjadi bagian penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan peran perempuan di sektor perempuan.

Layanan:

- Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
- Teras Pangan
- Edukasi gizi dan pengelolaan pangan rumah tangga.
- Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian rumah tangga,
- Peningkatan gizi keluarga melalui B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman)

e. Koperasi Tani/LKMA/BUMP

Koperasi Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di sektor pertanian, khususnya dalam bidang produksi, pengolahan hasil pangan, serta jasa pertanian.

Layanan:

- Fasilitasi perizinan usaha pertanian dan pangan.
- Dukungan akses modal dan pelatihan teknis produksi.

f. LKMA/Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Lembaga Ekonomi Tani

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dan Lembaga Ekonomi Tani merupakan lembaga

yang dibentuk oleh petani sebagai sarana untuk memperkuat usaha kolektif.

Layanan:

- Pembentukan dan pembinaan kelembagaan.
- Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha besar (offtaker).

g. Konsumen dan Masyarakat Umum

Merupakan pengguna akhir produk pertanian dan pangan yang dihasilkan oleh para petani dan pelaku usaha pertanian, mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga miskin serta kelompok rentan rawan pangan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan yang bermutu, aman, bergizi, dan terjangkau termasuk dalam pelaksanaan program dan kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan.

Layanan:

- Edukasi konsumsi pangan B2SA
- Pengawasan keamanan pangan segar.

h. Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta

Tenaga teknis lapangan yang secara mandiri memberikan pendampingan petani di lapangan.

Penyuluh Pertanian Swadaya atau Swasta merupakan tenaga teknis lapangan yang secara mandiri berperan aktif dalam memberikan pendampingan, bimbingan, dan advokasi kepada petani. Melalui peran mereka, petani didorong untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta penerapan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan. Keberadaan penyuluh swadaya dan swasta juga mencerminkan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pertanian, sehingga mampu memperkuat sistem penyuluhan dan memperluas jangkauan layanan pertanian.

Layanan:

- Fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan posluhdes
- Sarana prasarana penyuluhan
- Akses sarana penunjang penyuluhan.

i. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Lembaga pendidikan dan penelitian meliputi SMK, Perguruan Tinggi, serta lembaga riset pertanian yang memiliki peran dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di sektor pertanian, sehingga dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang lebih kompeten dan memperkuat pembangunan pertanian modern menuju pertanian yang lebih maju.

Layanan:

- Kolaborasi riset dan teknologi.
- Dukungan praktik lapang dan magang.
- Pengembangan inovasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan pertanian, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang direncanakan, dilakukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat yang difokuskan pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan pertanian di Kabupaten Trenggalek dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan kinerja pembangunan pertanian Kabupaten Trenggalek dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang kemudian dikelompokkan menjadi dasar dalam menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan pertanian Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek banyak menemukan berbagai masalah dalam pelayanan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Produktivitas pertanian yang masih rendah
   - Penggunaan benih unggul belum maksimal
   - Unsur hara tanah semakin berkurang karena penggunaan bahan kimia secara terus menerus
   - Kekurangan air akibat kekeringan berkepanjangan dampak anomali iklim El Nino Gorilla
   - Serangan hama dan penyakit tanaman
   - Masih tingginya *losis* panen
2. Petani milenial/taruna tani yang semakin berkurang
   - Pertanian sering dianggap sebagai pekerjaan yang berat, kotor dan tidak menjanjikan secara ekonomi dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor industri, perdagangan atau jasa.
   - Kurangnya dukungan dari keluarga
   - Keterbatasan pendidikan dan pelatihan berbasis pertanian modern
   - Pendapatan di sektor pertanian cenderung lebih rendah
3. Masih terdapat daerah rawan pangan
   - Ketergantungan pada satu jenis sumber pangan
   - Bencana alam dan perubahan iklim
   - Kurangnya edukasi gizi dan konsumsi yang tidak beragam
4. Ketahanan pangan rumah tangga masih rendah

- Pendapatan rumah tangga rendah
- Kurangnya pengetahuan gizi dan pola konsumsi yang tidak seimbang
- Ketergantungan pada satu jenis sumber pangan
- Kerentanan terhadap krisis atau bencana
- Kurang optimalnya pengelolaan pekarangan rumah tangga

5. Kapasitas SDM Penyuluh belum maksimal
   - Pelatihan dan peningkatan kompetensi kurang maksimal
   - Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital
   - Koordinasi lintas sektor yang kurang optimal
6. Kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani belum berfungsi dengan baik
   - Kurangnya partisipasi aktif anggota
   - Pengembangan kapasitas dan kemandirian kelembagaan yang kurang optimal
7. Pupuk organik belum banyak diusahakan oleh petani sehingga kesuburan tanah semakin menurun dan masih tergantung pada pupuk anorganik
   - Proses pembuatan pupuk organik yang dianggap rumit dan memakan waktu
   - Ketergantungan pada pupuk anorganik dan pupuk organik dianggap kurang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman.
8. Masih banyaknya infrastruktur pertanian yang belum terbangun/tertangani
   - Akses wilayah pertanian yang sulit dijangkau
   - Rendahnya partisipasi dan inisiatif masyarakat tani
   - Tingkat kerusakan infrastruktur yang tinggi dan lama tidak tertangani
9. Belum adanya insentif bagi petani yang berada di lahan LP2B
   - Terbatasnya anggaran untuk program insentif
10. *Smart Farming* (teknologi pertanian berbasis IoT, sensor, robotika dan analitik data / *big data*) yang masih asing bagi petani
    - Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi
    - Budaya dan kebiasaan kerja tradisional
    - Infrastruktur teknologi yang belum memadai
11. Belum optimalnya penyaluran cadangan pangan pemerintah pada daerah-daerah rawan pangan
    - Prioritas anggaran yang terbatas
    - Tantangan geografis dan infrastruktur

12. Mutu keamanan pangan masih rendah
    - Kurangnya pengetahuan petani dan pelaku usaha tentang standar keamanan pangan
    - Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengujian laboratorium
    - Fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang kurang memadai
13. Belum berimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat
    - Masyarakat belum memahami pentingnya gizi beragam bergizi seimbang dan aman
    - Ketergantungan pada satu jenis bahan pangan
    - Pendapatan yang masih rendah sehingga mengakibatkan keterbatasan untuk membeli bahan pangan yang lebih beragam dan bergizi
14. Mitigasi iklim masih kurang
    - Kurangnya kesadaran dan pemahaman akan mitigasi perubahan iklim
15. Perlindungan petani yang belum optimal (AUTP, Jaminan pasar, dan Akses perbankan)
    - Petani belum memahami akan manfaatnya
    - Petani beranggapan bahwa persyaratannya rumit
16. Pertanian di Kabupaten Trenggalek belum berbasis korporatif
    - Kelembagaan petani belum optimal
    - Mayoritas petani merupakan petani kecil sehingga belum memiliki skala ekonomi yang memadai untuk menjalankan usaha secara korporatif
    - Data komoditas pertanian belum akurat dan produksi belum *sustainable* sehingga pihak offtaker tidak berani melakukan kerjasama
17. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang belum merata
    - Terbatasnya personel
    - Terbatasnya anggaran dan dukungan logistik
18. Belum adanya gerakan dalam rangka substitusi pangan pokok beras
    - Kuatnya ketergantungan budaya makan harus “Nasi”
    - Kurangnya edukasi gizi dan diversifikasi pangan
19. Masih rendahnya diversifikasi pangan
    - Kuatnya ketergantungan budaya makan harus “Nasi”
    - Kurangnya edukasi gizi dan diversifikasi pangan
    - Kurangnya daya tarik produk pangan alternatif
20. Tingginya serangan hama penyakit
    - Anomali iklim

- Penggunaan varietas tanaman yang rentan hama penyakit
- Monitoring dini kurang optimal
- Penerapan pengendalian yang kurang tepat
- Rotasi tanaman belum sepenuhnya diterapkan

21. Ketersediaan pestisida untuk penjagaan serangan hama penyakit sangat terbatas
    - Anggaran terbatas sehingga mengandalkan bantuan pemerintah provinsi/pusat
22. Tingginya *losis* hasil panen
    - Teknologi panen dan pascapanen yang masih sederhana
23. Komoditas-komoditas pengendali inflasi belum banyak dikembangkan
    - Komoditas pengendali inflasi terutama bawang merah, bawang putih, cabai membutuhkan biaya usahatani dan resiko yang cukup tinggi
    - Inflasi untuk komoditas hortikultura biasanya terjadi pada musim penghujan sehingga petani lebih cenderung memilih menanam komoditas padi
    - Pola konsumsi masyarakat yang masih berat ke produk pokok tertentu
24. Kurangnya pembinaan IndoGAP (Indonesia *Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*)
    - Belum meratanya pelatihan IndoGAP di petani
    - Kurangnya pemahaman dan kesadaran petani/pelaku usaha
    - Tantangan dalam adaptasi teknologi dan regulasi baru, yang kadang sulit diikuti oleh petani maupun pelaku usaha kecil
25. Produk pertanian yang belum terstandarisasi
    - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang pentingnya standar mutu dan keamanan produk
    - Hasil pertanian berbasis IndoGAP dihargai sama oleh masyarakat sehingga petani enggan melakukan budidaya sesuai IndoGAP
    - Petani enggan mengurus standar sertifikasi karena beranggapan prosesnya terlalu rumit
26. Kebijakan pertanian yang mengarah ke inovasi belum banyak dilakukan
    - Kurangnya pemahaman dan kapasitas petani terhadap teknologi baru

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten

Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah :

Tabel 2.11
Keterkaitan Isu Strategis PD dengan Isu Strategis KLHS RPJMD

No.	Potensi daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Ketersediaan lahan pertanian, sumber daya manusia petani, komoditas unggulan daerah, serta dukungan sarana produksi dan kelembagaan petani	- Produktivitas pertanian yang masih rendah; - Pupuk organik belum banyak diusahakan oleh petani sehingga kesuburan tanah semakin menurun dan masih tergantung pada pupuk anorganik; - Tingginya serangan hama penyakit; - Ketersediaan pestisida untuk penjagaan serangan hama penyakit sangat terbatas; - Tingginya losis hasil panen; - Kurangnya pembinaan GAP, GHP, dan GMP; - Produk pertanian yang belum terstandarisasi;	Penguatan Investasi dan Ekonomi; Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan; Mitigasi dan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim;	Geopolitik & geoekonomi; Dampak perubahan iklim global;	Swasembada Pangan; Ekosistem Ekonomi Sirkular;	Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur tinggi; Alih Fungsi Lahan; Kerusakan Lingkungan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui penerapan praktik budidaya dan penanganan pascapanen yang baik

No.	Potensi daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
2	SDM Penyuluh, Kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani	– Petani milenial/taruna tani yang semakin berkurang; – Kapasitas SDM Penyuluh belum maksimal; – Kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani belum berfungsi dengan baik; – Pertanian di Kabupaten Trenggalek belum berbasis korporatif	Penguatan Investasi dan Ekonomi; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pergeseran budaya akibat teknologi informasi;	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi; Pendalaman Sektor Keuangan; Peningkatan Akses Lapangan Kerja & Usaha Berkelanjutan Inovatif	Alih Fungsi Lahan; Terbatasnya regenerasi petani di daerah	Penguatan kelembagaan dan regenerasi petani menuju sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan
3	Ketersediaan cadangan pangan, keberagaman komoditas pangan lokal, kelembagaan pangan, serta dukungan program diversifikasi konsumsi pangan untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan daerah.	– Masih terdapat daerah rawan pangan di Kabupaten Trenggalek – Ketahanan pangan rumah tangga masih rendah – Belum optimalnya penyaluran cadangan pangan pemerintah pada daerah-daerah rawan pangan	Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal; Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan	Geopolitik & geoekonomi; Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi;	Swasembada Pangan; Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan; Pengendalian Penyakit, Pembudayaan Hidup Sehat; Pengendalian Inflasi	Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur tinggi; Diversifikasi Pangan Lokal	Penguatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan keamanan serta keberagaman konsumsi pangan masyarakat

No.	Potensi daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
		– Mutu keamanan pangan yang masih rendah – Belum berimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang belum merata – Belum adanya gerakan dalam rangka substitusi pangan pokok beras – Masih rendahnya diversifikasi pangan					
4	Ketersediaan lahan, jaringan irigasi tersier, fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil pertanian, akses transportasi lokal, serta program insentif daerah untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan produktif.	– Masih banyaknya infrastruktur pertanian yang belum terbangun; – Belum adanya insentif bagi petani yang berada di lahan LP2B	Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal;	Geopolitik & geoekonomi;	Swasembada Pangan; Pengembangan Hilirisasi;	Alih Fungsi Lahan;	Pengembangan infrastruktur dan insentif pendukung untuk mendukung keberlanjutan pertanian

No.	Potensi daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
5	Ketersediaan lahan dan komoditas unggulan, SDM petani, fasilitas percontohan teknologi, penyuluhan pertanian, serta dukungan kelembagaan dan program inovasi untuk mempercepat adopsi teknologi modern.	– *Smart Farming* yang masih asing bagi petani; – Kebijakan pertanian yang mengarah ke inovasi belum banyak dilakukan	Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal; Pemantapan Tata Kelola Pemerintah (Good Government) dan Pelayanan Publik	Perkembangan teknologi industri 5.0;	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi; Peningkatan Perdagangan Domestik Antarwilayah & Ekspor; Peningkatan Akses Lapangan Kerja & Usaha Berkelanjutan Inovatif; Pengendalian Inflasi; Pembangunan Berketahanan Iklim	Perubahan Iklim; Kerusakan Lingkungan	Peningkatan adopsi teknologi pertanian modern dan inovasi untuk mendukung efisiensi dan daya saing sektor pertanian
6	Adanya lembaga keuangan mikro atau koperasi pertanian, program asuransi dan proteksi usaha tani, jaringan	– Perlindungan petani yang belum optimal (AUTP, jaminan pasar, dan akses perbankan)	Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal; Pemantapan Tata Kelola Pemerintah	Geopolitik & geoekonomi;	Ekosistem Ekonomi Sirkular; Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi;	Perubahan Iklim	Optimalisasi perlindungan dan akses pembiayaan bagi petani sebagai bagian dari sistem

No.	Potensi daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
	kelembagaan petani, serta kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses pembiayaan dan perlindungan usaha tani.		(Good Government) dan Pelayanan Publik		Pendalaman Sektor Keuangan; Peningkatan Akses Lapangan Kerja & Usaha Berkelanjutan Inovatif; Perlindungan Sosial Adaptif & Inklusif.		pertanian yang tangguh
7	Ketersediaan lahan untuk komoditas unggulan, kapasitas produksi petani lokal, kelembagaan dan jaringan distribusi pangan daerah, serta fasilitas penyimpanan dan pasca panen yang mendukung stabilitas harga dan pasokan pangan.	– Komoditas-komoditas pengendali inflasi belum banyak dikembangkan	Penguatan Investasi dan Ekonomi Lokal;	Geopolitik & geoekonomi;	Swasembada Pangan; Ekosistem Ekonomi Sirkular; Peningkatan Perdagangan Domestik Antarwilayah & Ekspor; Pengendalian Inflasi;	Diversifikasi Pangan Lokal	Pengembangan komoditas strategis untuk pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan

No.	Potensi daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
8	Ketersediaan lahan dan sumber daya lokal, praktik pertanian adaptif yang sudah diterapkan, akses teknologi ramah lingkungan, serta kelembagaan dan program dukungan daerah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	– Mitigasi iklim masih kurang – Ketersediaan pestisida sangat terbatas	Mitigasi dan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Dampak perubahan iklim global; Geopolitik & geoekonomi	Pengendalian Penyakit, Pembudayaan Hidup Sehat; Pembangunan Berketahanan Iklim	Perubahan Iklim; Kerusakan Lingkungan	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam sistem pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara optimal. Visi dan misi ini merupakan mandat dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2029, Bapak Mochamad Nur Arifin, S.E., M.PSDM dan Bapak Syah Muhammad Natanegara, S.H., yang berpijak pada sektor-sektor unggulan sumber daya Kabupaten Trenggalek, seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kerangka ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi serta misi kepala daerah yang mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai selama masa kepemimpinan. Sementara itu, sasaran merupakan rincian dari tujuan yang bersifat terukur, sehingga kemajuan kinerja dapat dipantau dari tahun ke tahun dan pada akhir periode perencanaan. Sasaran ini menjadi panduan operasional agar proses pembangunan berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Dengan demikian, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh pemangku kepentingan menuju capaian pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

VISI

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus melanjutkan langkah transformatif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dalam kurun waktu 2021–2026, arah pembangunan daerah telah dirumuskan melalui visi “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif, dan Pembangunan Berkelanjutan.” Visi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata, pengembangan kapasitas SDM, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan.

Visi tersebut menjadi fondasi menuju arah jangka panjang yang lebih ambisius: Kabupaten Trenggalek 2030 – *Sustainable City and Communities in Indonesia*. Sebuah orientasi pembangunan jangka panjang yang meletakkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota dan komunitas berkelanjutan di Indonesia. Untuk mencapai visi 2030 tersebut, RPJMD 2025–2029 hadir sebagai tahapan strategis dengan semangat percepatan bertajuk #Trenggalekmeroket, yang menekankan pada penguatan industri agro dan perikanan berkelanjutan *(sustainable agro and fisheries industries*) sebagai basis transformasi ekonomi daerah.

Roadmap Pembangunan Kabupaten Trenggalek



Arah pembangunan daerah lima tahun ke depan dirancang dengan mengedepankan keseimbangan antara tiga dimensi utama: *prosperity* (kemakmuran), *people* (kesejahteraan rakyat), dan *planet* (kelestarian lingkungan). Pendekatan ini menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Kabupaten Trenggalek ditargetkan menjadi daerah yang mampu menciptakan kemakmuran berbasis potensi lokal, meningkatkan taraf hidup masyarakat secara inklusif, serta menjaga keberlangsungan sumber daya alamnya.

RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi kelanjutan teknokratis dari visi pembangunan sebelumnya, tetapi juga mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Prasasti Masahar peninggalan Mpu Sendok sebagai pijakan moral dalam membangun pemerintahan. Prasasti tersebut menetapkan wilayah Masahar sebagai tanah sima atau wilayah suci sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan tanah yang dijaga kesuciannya. Namun yang paling kuat adalah pesan peringatan dalam bentuk kutukan terhadap siapa pun yang melanggar perjanjian atau amanah “tubuh akan dirobek, darah diminum, daging dimakan, disambar petir, dipatok ular, hingga dilempar dari langit”. Kutukan tersebut bukan sekadar ancaman fisik, tetapi simbol yang sangat jelas tentang beratnya konsekuensi moral atas pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan keluhuran tugas pemerintahan. Hal ini menjadi pengingat bahwa integritas, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat adalah fondasi mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan merujuk pada nilai-nilai sejarah, arah pembangunan nasional, dan potensi strategis daerah, maka dirumuskanlah visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025–2029:

Visi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029



Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang berpihak kepada rakyat, pemerataan hasil pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, guna memastikan kesejahteraan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pokok Visi	Uraian
Adil	Visi "Trenggalek Adil" mengandung makna penting bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan dan kemajuan, tetapi juga menjamin keadilan dalam pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Salah satu manifestasi keadilan tersebut adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar kawasan, aksesibilitas layanan dasar, serta pengurangan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek diarahkan agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja, melainkan menyentuh desa-desa dan daerah tertinggal, sehingga semua warga memiliki kesempatan yang setara dalam menikmati manfaat pembangunan. Selain itu, keadilan juga diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas menjadi syarat mutlak bagi pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas akan menjadi fondasi bagi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, visi "Trenggalek Adil" menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem

Pokok Visi	Uraian
	pemerintahan yang menjamin kesetaraan hak, keberpihakan terhadap yang lemah, serta kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
Makmur	Visi "Trenggalek Makmur mencerminkan cita-cita besar Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Makmur dalam konteks ini tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup yang menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, baik melalui perluasan akses terhadap layanan dasar maupun pengurangan kesenjangan sosial. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting agar masyarakat Kabupaten Trenggalek mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pembangunan dengan daya saing yang tinggi. Selaras dengan itu, visi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan dengan mengandalkan potensi unggulan daerah seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat struktur ekonomi lokal. Di tengah dinamika perubahan iklim dan risiko bencana, upaya pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan pendekatan yang holistik ini, "Trenggalek Makmur" menjadi simbol kemajuan daerah yang berpihak pada manusia, berakar pada alam, dan berorientasi pada masa depan.

Visi Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, yang dicapai melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, regeneratif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemakmuran tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari keadilan dalam distribusi hasil pembangunan, keterbukaan akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penguatan SDM yang kreatif dan inovatif menjadi kunci dalam melampaui jebakan ekonomi ekstraktif dan birokrasi yang tidak adaptif, menuju sistem ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif (*open government*). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal, terutama sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Namun, pengelolaan dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, agar kelestarian

lingkungan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Visi RPJMN dan Provinsi Jawa Timur



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Visi ini selaras dan berkontribusi langsung terhadap visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung visi Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2025–2029, yakni "Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Dengan keterpaduan arah pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten, visi "Trenggalek yang Adil dan Makmur" menjadi bagian integral dari upaya kolektif membangun Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.

MISI

Misi merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan, misi berfungsi sebagai jembatan antara visi jangka panjang dengan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Rumusan misi yang baik memberikan penjabaran yang jelas mengenai upaya-upaya konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mudah diterjemahkan ke dalam indikator dan target yang terukur. Penyusunan misi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, agar selaras dengan tantangan dan peluang pembangunan. Substansi dari visi dan misi ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, perbaikan pelayanan publik, dan penyelesaian persoalan strategis. Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur", Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan arah misi pembangunan yang dibagi ke dalam tiga pilar strategis. Ketiga pilar ini merupakan kerangka utama yang akan memandu perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama periode 2025–2029. Pilar Pilar tersebut mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Adapun ketiga pilar tersebut adalah: Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif, Pilar *Net Zero Carbon*, dan Pilar SDM Kreatif dan Inovatif.

1. Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif

Pilar ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kabupaten Trenggalek diarahkan menjadi daerah yang inklusif—dimana seluruh masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan ekonomi. Pendekatan regeneratif menekankan pengelolaan sumber daya unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan menjadi penguat bagi konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal yang tangguh.

2. Pilar *Net Zero Carbon*

Pilar ini menunjukkan komitmen Kabupaten Trenggalek dalam menjawab tantangan perubahan iklim melalui pembangunan yang rendah emisi karbon. Dengan mendorong praktik ramah lingkungan, konservasi alam, dan pengelolaan risiko bencana secara terpadu, Kabupaten Trenggalek ingin menjadi kabupaten yang tangguh iklim, harmonis dengan alam, serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pilar ini mendorong transisi energi bersih, efisiensi sumber daya, dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Di samping itu, upaya pengurangan emisi juga mencakup pengelolaan sektor sampah dan air limbah secara berkelanjutan, serta penurunan emisi dari proses industri dan penggunaan produk atau Industrial Processes and Product Use (IPPU). Pilar ini menempatkan Kabupaten Trenggalek sebagai contoh daerah yang tidak hanya berkembang, tetapi juga menjaga warisan lingkungan untuk generasi yang akan datang.

3. Pilar SDM Kreatif dan Inovatif

Pilar ini berfokus pada pembangunan manusia sebagai inti dari kemajuan daerah. Kabupaten Trenggalek menempatkan pengembangan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, dan adaptif sebagai prioritas utama. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta akses terhadap teknologi dan keterampilan digital menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing di era ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan agar lebih terbuka, partisipatif, dan melayani, sebagai bagian dari ekosistem inovasi yang sehat dan berorientasi pada hasil.

Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029



Penuangan pilar tersebut kedalam misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029, dijelaskan sebagai berikut:

MISI 1 : Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim

Misi ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik Kabupaten Trenggalek sebagai kawasan yang layak huni, produktif, dan terhubung secara baik antar kawasan. Pengembangan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berwawasan lingkungan menjadi landasan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan diarahkan untuk tidak hanya menyentuh pusat kota, tetapi juga menjangkau desa dan kawasan pinggiran, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Lebih dari sekadar menciptakan kenyamanan bagi penduduk, misi ini menempatkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota atraktif yang mampu menarik kehadiran wisatawan, pelajar, pekerja, hingga investor untuk datang, tinggal, dan beraktivitas di wilayah ini. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang, Kabupaten Trenggalek diharapkan tumbuh sebagai simpul pertumbuhan yang dinamis dan kompetitif di tingkat regional.

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan

Misi ini menitikberatkan pada penciptaan sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Kabupaten Trenggalek akan mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan pendekatan regeneratif, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara berimbang antara eksploitasi dan pelestarian. Ekonomi inklusif berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, sementara pendekatan regeneratif memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak daya dukung

lingkungan, tetapi justru memperkuatnya.

MISI 3 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan

Misi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Trenggalek dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan dengan memperkuat daya dukung ekologis wilayah. Kota lestari diwujudkan melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, konservasi lingkungan, serta tata ruang yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Kabupaten Trenggalek diarahkan menjadi daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harmonis dengan alam dan memiliki ketahanan jangka panjang terhadap krisis iklim.

MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi

Misi ini bertujuan untuk memperkuat modal manusia sebagai inti dari kemajuan daerah. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui perbaikan layanan kesehatan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, serta penguatan pelatihan dan inovasi berbasis teknologi. SDM Kabupaten Trenggalek didorong untuk menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, kreatif dalam berkarya, serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Misi ini juga selaras dengan upaya mendorong inklusi sosial dan mobilitas vertikal masyarakat miskin dan rentan.

MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan

Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | III-10 dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan integritas dan efisiensi birokrasi akan didorong melalui digitalisasi pelayanan dan pengawasan kinerja yang objektif. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik dan mempercepat keberhasilan pembangunan daerah.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 yang mengusung cita-cita “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur” disusun selaras dengan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia yang berkeadilan. Kelima misi pembangunan Kabupaten Trenggalek diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan yang tidak hanya memperkuat infrastruktur dan ekonomi lokal, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Seluruh arah kebijakan ini juga mengintegrasikan prinsip dan tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, dengan semangat “No One Left Behind”. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek tidak

hanya berkomitmen membangun daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif nasional dan global dalam mencapai masa depan yang adil, lestari, dan inklusif.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Trenggalek dengan Tujuan Negara dan SDG's



Dalam rangka mendukung visi pembangunan Kabupaten Trenggalek yang berkelanjutan dan berdaya saing tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menetapkan arah kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani. Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Tujuan Pembangunan daerah yang sesuai dengan Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut:

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dalam mendukung tercapainya visi, misi dan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Adapun tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian dengan indikator Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (indikator ADHB)

3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran dalam mendukung tercapainya visi, misi dan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Relevansi RPJMD dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

RPJMD		RENSTRA	
MISI	**TUJUAN**	**TUJUAN**	**INDIKATOR**
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian	Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dengan Indikator Sasaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Sasaran 2 : Meningkatnya kesejahteraan petani dengan Indikator Sasaran adalah Nilai Tukar Petani (NTP)

Sasaran 3 : Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan dengan indikator Sasaran adalah Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Pada RPJMD Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

RPJMD			RENSTRA	
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**TUJUAN**	**SASARAN**
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor unggulan strategis potensial	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Meningkatnya kesejahteraan petani
				Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan

Berikut teknnik merumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN											
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian		Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) (Milyar Rp.) ()	6.056,86	6.511,70	6.769,77	7.027,83	7.285,89	7.543,96	7.802,02	
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (poin)	83,17	83,37	83,57	83,77	83,97	84,17	84,37	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	103,65	104,15	104,65	105,15	105,65	106,15	106,65	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)	89,49	89,64	89,79	89,94	90,09	90,24	90,39	
			Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakatÂ (SKM) (Indeks)	99,74	99,77	99,78	99,79	99,80	99,81	99,82	

3.3 Strategi Dinas Pertanian dan Pangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi adalah rencana tindakan, langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa langkah optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Trenggalek terpilih. Strategi pembangunan ini juga merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk merumuskan program sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Trenggalek, Dinas Pertanian dan Pangan lebih difokuskan pada program untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu "Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif berbasis sumber daya unggulan daerah. Fokus Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek lebih pada tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Sedangkan sasaran RPJMD 2025-2029 difokuskan pada sasaran Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial dengan indikator sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut Dinas Pertanian dan Pangan menetapkan tujuan Renstra yaitu Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian dengan indikator Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB). Sedangkan sasaran Renstra yaitu 1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dengan Indikator Sasaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan 2. Meningkatnya kesejahteraan petani dengan Indikator Sasaran adalah Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan permasalahan yang dihadapi, maka dirumuskan strategi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2025-2029 yaitu :

STRATEGI :

Penguatan produksi tanaman pertanian, hortikultura, perkebunan secara terpadu dan berkelanjutan serta penguatan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Strategi ini merupakan langkah penting untuk menjaga sumber daya ekstraktif secara regeneratif sehingga sumber daya yang dikelola dapat memberikan manfaat ekonomis namun tetap terjaga kelestariannya. Strategi ini didukung dengan beberapa upaya seperti pembatasan sektor ekonomi ekstraktif, hilirisasi komoditas pertanian hortikultura dan perkebunan, serta menerapkan pertanian terpadu dengan konsep modernisasi pertanian yang presisi guna dan kolaborasi antara pertanian, peternakan, perikanan.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, diperlukan penahapan pembangunan sebagai prioritas/fokus setiap tahunnya hingga masa periode Renstra berakhir. Fokus tahunan disusun secara bertahap, berkaitan dan saling menguatkan, dengan pendekatan pada tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor pertanian. Berdasarkan sasaran meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau, serta meningkatnya kesejahteraan petani, berikut penahapan pembangunan perkebunan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Tahun 2025-2029

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana pertanian dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian	Peningkatan produksi, produktivitas, dan perlindungan petani	Peningkatan mutu hasil pertanian melalui pertanian presisi, smart farming dan budidaya pertanian berkelanjutan	Swasembada pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, memperkuat ekonomi dan mencapai kedaulatan pangan	Peningkatan ketahanan pangan dengan terpenuhinya pangan masyarakat yang B2SA, berbasis sumberdaya lokal, terjangkau, akses mudah dan stabilitas harga pangan strategis terjaga.

Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, prioritas pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pertanian sebagai fondasi awal penguatan usahatani di masyarakat agar mampu meningkatkan luas tanam, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian. Upaya ini diawali dengan validasi data sarana prasarana eksisting dan kebutuhan di masyarakat. Pada tahap ini secara teknis, strategi difokuskan pada penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana pertanian berupa benih unggul bersertifikat untuk menjamin kualitas dan hasil tanaman, fasilitasi pemenuhan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, traktor, kultivator, handsprayer, mesin perajang tembakau dan alat mesin pendukung lainnya, prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, jalan produksi, greenhouse, saluran irigasi dan prasarana lainnya agar petani dapat mengakses input produksi secara tepat waktu, lebih cepat dan berkualitas. Hal tersebut juga didukung dengan penerapan praktik budidaya sesuai standar *Indonesia Good Agricultural Practice*s (*Indo*GAP), GHP, GMP guna meningkatkan efisiensi usaha tani, dan mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan. Untuk memastikan efektivitas program, upaya meningkatkan SDM pertanian baik petani, kelompok tani, kelompok wanita tani, gapoktan dan penyuluh pertanian terus diupayakan agar mempercepat proses adopsi dan diseminasi penerapan teknologi.

Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra, pembangunan pertanian dan pangan difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas dan perlindungan petani. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian hortikultura dan perkebunan sangat didukung dengan adanya pemantapan sarana prasarana di tahun pertama sebagai fondasi dalam pencapaiannya. Setelah fondasi kuat, maka selanjutnya di tahun kedua produksi dan produktivitas terus ditingkatkan dan didorong melalui peningkatan luas tambah tanam (LTT) baik secara tumpang sari dan tumpang sisip, peningkatan indeks pertanaman (IP), intensifikasi pertanian, optimalisasi lahan dan pertanian terpadu (integrated farming). Efisiensi

usahatani melalui pengelolaan manajemen agribisnis diterapkan agar petani mendapatkan hasil pertanian yang menguntungkan. Selain itu pemantapan perlindungan petani melalui asuransi usaha tani terus ditingkatkan dalam rangka dapat menekan resiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama atau penyakit tanaman. Keberlanjutan dan peningkatan program asuransi usaha tani diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani, meminimalkan risiko kerugian dan mewujudkan masa depan pertanian yang lebih sejahtera dan berkelanjutan menuju ketahanan pangan nasional.

Pada tahun ketiga, arah pembangunan pertanian dan pangan difokuskan pada Peningkatan mutu hasil pertanian melalui pertanian presisi, *smartfarming* dan budidaya pertanian berkelanjutan. Produksi dan produktivitas akan semakin baik apabila didukung dengan mutu yang berkualitas, sehingga akan meningkatkan nilai tukar yang diterima petani. Oleh karena itu di tahun kedua, upaya peningkatan mutu hasil pertanian digenjot dengan implementasi pertanian presisi berbasis *smartfarming*. Implementasi *Smartfarming* pada sistem pertanian mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi digital. Sistem ini meliputi penggunaan teknologi internet, sensor, dan analitik data yang dapat membantu para petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Pertanian presisi melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan tanaman dan tanah mendapatkan perawatan yang tepat pada waktu yang tepat. Sistem GPS dan GIS (Geographic Information System) digunakan untuk memetakan lahan dan merencanakan penanaman dengan lebih efektif. *Smartfarming* memiliki potensi besar dalam mengurangi biaya produksi/meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, meningkatkan hasil panen, lebih cepat dan tepat dalam pengendalian hama penyakit, petani dapat mengurangi pemborosan sumber daya alam seperti air, pupuk, pestisida sehingga mengurangi risiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Dengan demikian, smart farming membantu meningkatkan mutu/kualitas produk pertanian dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan budidaya pertanian berkelanjutan.

Pada tahun keempat arah pembangunan difokuskan pada Swasembada pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, memperkuat ekonomi dan mencapai kedaulatan pangan. Upaya ini sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pemantapan faktor pendorong peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil pertanian di tahun tahun sebelumnya merupakan upaya menjadikan fondasi pencapaian kestabilan ketersediaan pangan di masyarakat di tahun keempat dan seterusnya. Dalam konteks ini, pemerintah fokus pada swasembada pangan tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat ketahanan pangan.

Dengan memastikan bahwa pangan dapat diproduksi sendiri mampu mencukupi, stabil, dan terjangkau, maka dapat melindungi perekonomian dari fluktuasi harga global serta krisis pangan. Selain itu, pembangunan berbasis kemandirian pangan juga membuka lapangan kerja luas di sektor hulu hingga hilir, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama dalam sistem pangan nasional. Seluruh arah kebijakan ini bertujuan membangun ekosistem usaha tani yang terintegrasi, efisien, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB daerah secara

berkelanjutan.

Pada akhir tahun (Tahun kelima) pelaksanaan Renstra, prioritas pembangunan difokuskan pada Peningkatan ketahanan pangan dengan terpenuhinya pangan masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), berbasis sumberdaya lokal, terjangkau, akses mudah dan stabilitas harga pangan strategis terjaga. Tahapan awal dalam peningkatan ketahanan pangan dimulai dengan penguatan produksi pangan lokal yang berbasis pada potensi sumber daya daerah. Pendekatan ini menekankan pentingnya diversifikasi pangan dengan mengembangkan komoditas pangan non-beras seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan sumber protein lokal. Program edukasi kepada petani, pelaku usaha pangan, serta masyarakat dilakukan agar mereka memahami pentingnya pangan B2SA dan cara mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Tahapan kedua adalah pengolahan dan distribusi pangan yang efisien dan terjangkau, guna memastikan masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat mengakses pangan yang bergizi dan aman. Di tahap ini, dikembangkan sistem logistik pangan yang memperpendek rantai pasok agar harga tetap terjangkau serta mengurangi risiko kehilangan pasca-panen. Dukungan terhadap UMKM pangan lokal juga diperkuat, sehingga produk olahan pangan berbasis lokal dapat tersedia secara luas di pasar tradisional maupun modern. Pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi infrastruktur distribusi serta mendorong kolaborasi antar pelaku usaha untuk menjamin ketersediaan pangan secara merata.

Tahapan terakhir mencakup pengendalian stabilitas harga dan penguatan cadangan pangan strategis, sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak pasar maupun bencana alam. Pemerintah bersama lembaga terkait melakukan pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mengintervensi pasar saat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Cadangan pangan lokal diperkuat, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui sistem informasi pangan yang terpadu. Dengan begitu, ketahanan pangan tidak hanya terjaga dari sisi ketersediaan, namun juga dari segi aksesibilitas, keterjangkauan, serta keberlanjutan konsumsi pangan yang B2SA bagi seluruh masyarakat.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi maka dirumuskan **Arah Kebijakan** Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2025-2029 yaitu :

1. Penyediaan cadangan pangan pemerintah

   Merupakan strategi penting yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, terutama saat terjadi gejolak pasokan, bencana alam, kondisi darurat, atau fluktuasi harga pasar. Cadangan pangan ini berfungsi

sebagai buffer stock atau stok penyangga yang dapat segera didistribusikan kepada masyarakat ketika terjadi kelangkaan atau gangguan pasokan pangan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, dan komoditas strategis lainnya. Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) di Kabupaten Trenggalek untuk saat ini adalah beras sejumlah 94,172 ton. Dengan demikian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah melebihi kewajiban yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 81,28 ton.

2. Optimalisasi lumbung pangan dan infrastruktur kemandirian pangan

   Merupakan strategi untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan. Optimalisasi lumbung pangan juga berfungsi untuk meningkatkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan. Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Trenggalek yang aktif saat ini adalah 6 lumbung pangan.

   Infrastruktur kemandirian pangan juga menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Pangan berupa *Bed Dryer,* Lantai Jemur, *Rice Milling Unit* (RMU), *Colour Sorter*, *Sealer*, Timbangan, pengukur kadar air dan kemasan. Selain itu pendampingan dan pelatihan bagi produsen pangan terus dilakukan sampai dengan mendapatkan standarisasi nasional Indonesia GAP.

3. Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan rumah tangga

   Merupakan strategi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan tingkat rumah tangga yang biasa disebut dengan pekarangan pangan bergizi. Strategi ini sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah yang dibudidayakan dengan tanaman yang mempunyai nilai jual maupun nilai gizi untuk mendukung pangan keluarga serta sebagai upaya untuk pengendalian inflasi daerah. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT).

4. Peningkatan pengawasan keamanan pangan

   Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Pengawasan keamanan pangan segar merupakan pengawasan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga semua pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar aman dikonsumsi. Saat ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek telah memiliki Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Trenggalek. Kegiatan Pengawasan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) rutin dilaksanakan setiap bulan. Perwujudan strategi ini harus didukung dengan Laboratorium PSAT di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan PSAT *mobile* dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Penanganan daerah rentan pangan

   Di Kabupaten Trenggalek masih ada beberapa Desa yang masuk dalam

kategori Daerah rentan pangan yang disebabkan oleh ketersediaan pangan yang tidak memadai, keterjangkauan pangan yang rendah akibat kemiskinan, distribusi pangan yang terhambat, iklim ekstrim yang memicu penurunan produksi maupun gagal panen. Penanganan daerah rentan pangan dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengatasi masalah ketersediaan, aksesbilitas dan stabilitas pangan di suatu wilayah melalui pencegahan dan penanggulangan. Pelaksanaan penanganan pangan yang mencakup meliputi pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan, pengelolaan cadangan pangan, mobilisasi pangan dari Daerah surplus ke defisit, pengembangan sistem peringatan dini, promosi konsumsi pangan lokal dan beragam, serta pemberian bantuan sosial bagi daerah rentan pangan.

6. Penganekaragaman konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)

   Penganekaragaman konsumsi pangan dapat meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat. B2SA sendiri merujuk pada pola konsumsi makanan yang ideal untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep 4 sehat 5 sempurna yang lebih ditekankan pada pentingnya variasi makanan untuk mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan, proporsi yang tepat, serta bebas dari cemaran yang bisa membahayakan. Manfaat dari B2SA secara umum untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan dimana pangan B2SA menyediakan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, daya tahan tubuh dan kesehatan optimal pangan B2SA dapat dipenuhi dari sumber pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar dan tidak selalu mahal konsep ini terbukti telah mampu mencegah gizi buruk dan stunting sehingga dapat melahirkan generasi sehat, cerdas, tangkas dan produktif. Moto dari kegiatan B2SA adalah makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan yang mempunyai makna secara tidak langsung dengan kebijakan ini maka *food waste* akan dapat kita tekan semaksimal mungkin.

7. Pelatihan standarisasi IndonesiaGAP, GHP, GMP

   Pelatihan Standarisasi IndoGAP, GMP, dan GHP adalah program pembekalan dan peningkatan kapasitas bagi petani, pelaku usaha tani, serta pelaku agribisnis agar mampu menerapkan praktik pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang baik, aman, dan sesuai standar nasional maupun internasional. Pelatihan Standarisasi *Indonesia Good Agricultural Practices* (IndoGAP) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada petani dalam menerapkan praktik budidaya pertanian yang baik dan berkelanjutan. Pelatihan ini meliputi pengelolaan tanah, air, dan tanaman secara ramah lingkungan, penggunaan pestisida secara bijak, serta pencatatan dan dokumentasi usaha tani. IndoGAP merupakan adaptasi dari sistem *Good Agricultural Practices* (GAP) internasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas dan jaminan keamanan pangan dari produk segar hasil pertanian. Sertifikasi IndoGAP juga menjadi prasyarat penting dalam memperoleh akses pasar, baik domestik maupun ekspor karena diera modern ini kebutuhan akan pangan yang

berkualitas tinggi dan aman menjadi prasyarat utama pasar dunia.

Good Handling Practices (GHP) adalah cara penanganan pascapanen yang baik yang berkaitan dengan penerapan teknologi serta cara pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan. GHP merupakan suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. GHP dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan dan kondisi higienis yang harus dipenuhi dengan memantau semua proses rantai makanan untuk menjamin mutu makanan. GHP berisi tentang tata cara, bangunan dan lingkungan, lokasi serta persyaratan dalam penanganan pangan pada setiap tahapan kegiatan penanganan pasca panen (Permentan, 2015) *Good Handling Practices* ini meliputi pelaksanaan kegiatan penanganan pasca panen produk pertanian secara baik dan benar, sehingga mutu produk dapat dipertahankan, menekan kehilangan karena penyusutan atau kerusakan serta memperpanjang daya simpan dengan tetap menjaga status produk yang ditangani. Informasi tentang pasca panen dapat digunakan sebagai pegangan/pedoman bagi para petugas penyuluh/ pendamping dan kelompok tani dalam menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) masing komoditas hasil pertanian sehingga dapat melaksanakan penanganan panen dan pasca panen hasil pertanian dengan baik dan benar sehingga mutu hasil memenuhi standar mutu yang berlaku seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) (Permentan, 2015).

Salah satu faktor yang menentukan daya saing suatu produk dalam perdagangan bebas yaitu adanya jaminan mutu dan keamanan (*safety*) pangan bagi konsumen dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang bersangkutan. Sebagai suatu upaya minimal harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang bersangkutan untuk terciptanya jaminan mutu dan keamanan bagi konsumen produk olahan hasil-hasil pertanian dengan menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (CPB) atau *Good Manufacturing Practices* (GMP). Cara Pengolahan Yang Baik (CPB) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan kerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut diupayakan untuk dapat mencegah terjadinya kontaminasi/pencemaran oleh mikro organisme, benda/bahaya fisik dan senyawa kimia yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia dan masyarakat serta menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (GMP) dimaksudkan sebagai pedoman secara umum dalam melaksanakan kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian secara baik dan benar, sehingga menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar mutu olahan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat di kalangan petani/Gabungan Kelompok Tani/pelaku usaha yang bermitra dengan petani. Adapun bentuk kebijakan ini adalah dalam bentuk pelatihan dan pembinaan sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penerapan cara pengolahan hasil pertanian yang baik, yaitu : 1). Meningkatkan daya saing produk olahan hasil pertanian; 2). Meningkatkan mutu produk olahan yang dihasilkan secara konsisten sehingga aman dikonsumsi masyarakat; 3. Meningkatkan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian di tingkat petani/Gabungan Kelompok Tani/pelaku usaha yang

bermitra dengan petani; dan 4. menciptakan unit pengolahan yang ramah lingkungan.

8. Peningkatan luas tambah tanam, penerapan tumpangsari dan tumpang sisip

   Peningkatan luas tambah tanam merupakan strategi utama menuju swasembada pangan. Arah kebijakan ini merujuk pada penambahan luas pertanian yang ditanami pada periode tertentu untuk peningkatan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, dan kedelai. Peningkatan luas tambah pangan ini bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (frekuensi pangan dalam satu tahun pada lahan yang sama) untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam mencapai swasembada. Swasembada pangan dicapai dengan upaya penerapan tumpang sari (penanaman dua atau lebih jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama) maupun tumpang sisip, dimana tanaman padi, jagung, kedelai ditanam di antara tegakan pohon produksi seperti tanaman kayu maupun tanaman perkebunan lainnya. Selain itu, peningkatan luas tambah tanam juga didorong dengan implementasi budidaya padi hemat air utamanya pada lahan kering, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), dari IP0 menjadi IP1, lahan IP1 menjadi IP2 dan IP2 menjadi IP3.

9. Dukungan sarana pra dan pasca panen

   Arah kebijakan ini bertujuan untuk peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka peningkatan produksi. Produktivitas akan dapat tercapai secara maksimal apabila sarana pra dan pasca panen dapat terpenuhi diantaranya benih unggul, benih rendah emisi, pestisida, pestisida nabati, agensia hayati, pupuk, alat mesin pertanian yang meliputi alat olah tanah, alat tanam, *hand sprayer*, drone serta menekan *losis* panen dengan alat mesin pertanian modern pasca panen seperti *combine harvester*, *corn sealer*, *cooper*, perajang tembakau, alat pasca panen kopi dll. Alat alat pasca penen ini diupayakan dalam rangka mengurangi losis hasil panen yang bisa mencapai 10% lebih. Diharapkan dengan adanya alat alat pasca panen ini akan mampu menekan losis hasil pertanian sehingga produksi akan semakin meningkat.

10. Optimalisasi prasarana pertanian (Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi Perkebunan, Irigasi Air Tanah, Pompa Air Tenaga Surya, *Greenhouse*, Dam Parit, Rumah Pengering Tembakau, Dam Parit, dll)

    Kebijakan ini diambil karena prasarana pertanian di Kabupaten Trenggalek seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha tani, irigasi air tanah maupun dam parit masih banyak yang belum layak dan sesuai dengan harapan petani. Oleh karena itu peningkatan prasarana ini akan sangat membantu petani dalam upaya peningkatan indeks pertanian. Diharapkan IP petani akan mampu meningkat dari 1 kali menjadi 2 kali dan 2 kali menjadi 3 kali atau bahkan bisa mencapai 4 kali. Selain itu dukungan prasarana berupa pompa air tenaga surya saat ini penting karena lebih hemat dibandingkan dengan sistem konvensional yang menggunakan bahan bakar /listrik yang mahal, kebutuhan perawatan pompa tenaga air tenaga surya juga lebih sederhana serta bersifat ramah lingkungan mendukung *net zero carbon*. Perkembangan teknologi budidaya modern tanaman hortikultura menggunakan greenhouse juga sangat dibutuhkan dalam mengejar peningkatan produksi tanaman hortikultura.

11. Pengembangan perlindungan petani melalui AUTP, SL OPT, SL PHT, SL Iklim,

Gerakan Pengendalian OPT

Kebijakan ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahataninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (risk management) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti-rugi bagi petani yang terkena bencana. Melalui program Asuransi Usahatani Padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Dengan AUTP, petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melakukan atau melanjutkan kegiatan berusahatani karena sudah memiliki modal kerja yang diperolehnya, yakni ganti rugi atas risiko usaha tani yang dialaminya.

Selain itu perlindungan terhadap usahatani yaitu melalui sekolah lapangan organisme penganggu tanaman (SL-OPT) dan sekolah lapangan Iklim (SL Iklim) dimana hal ini sangat diperlukan petani agar mampu mengelola tanaman yang diusahakan dan perlindungan tanaman dari serangan organisme penggangu tanaman serta mitigasi iklim sehingga petani mempunyai wawasan dan mampu dalam mengambil keputusan untuk menaentukan komoditas apa yang akan ditanam sesuai kondisi iklim yang ada.

12. Peningkatan SDM Petani miskin, peningkatan petani milenial dan kelembagaan petani

    Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan kepada petani, kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani. Kebijakan ini difokuskan untuk mendorong petani miskin menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dimana diberi pendampingan berupa pelatihan praktis dan pendampingan intensif serta pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Sedangkan untuk menarik minat petani milenial, program dirancang untuk memanfaatkan agribisnis digital, mendorong adopsi teknologi modern berbasis smart farming seperti *hydroponic farming*, drone serta memfasilitasi akses mereka ke lahan, penguatan unit jasa alsintan di kelompok tani, didorong dengan bantuan modal dan jaringan bisnis. Peningkatan kelembagaan petani (kelas kelompok tani/KWT) terus diupayakan karena menjadi tolak ukur bahwa kelompok tani memiliki kemampuan merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan serta kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani.

13. Pembentukan korporasi petani/BUMP

Kebijakan konsep korporasi petani merupakan strategi transformatif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani secara kolektif. Untuk memperkuat kolektivitas, kelembagaan petani didorong untuk membentuk korporasi petani, yang memungkinkan mereka mengelola seluruh rantai nilai dari hulu ke hilir, meningkatkan posisi tawar dalam bermitra, dan menjamin stabilitas harga dan pasar. Dengan bersatu dalam sebuah entitas bisnis profesional, petani dapat meningkatkan posisi tawar saat membeli sarana produksi dan menjual hasil panen, sekaligus memangkas rantai distribusi untuk memaksimalkan keuntungan. Pembentukan korporasi petani diharapkan membuka peluang pengembangan agroindustri dengan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, dengan korporasi petani status hukum lebih jelas, memudahkan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan, menjadikan korporasi petani sebagai motor penggerak bisnis yang kuat, profesional, dan berkelanjutan.

14. Insentif bagi petani sebagai tindak lanjut perda LP2B

    Pemberian insentif bagi petani merupakan langkah tindak lanjut yang sangat penting dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Insentif ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan kompensasi kepada petani yang berkomitmen menjaga lahan mereka agar tetap berfungsi sebagai lahan pertanian produktif, alih-alih mengkonversinya untuk kepentingan non-pertanian. Insentif dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan langsung tunai, keringanan pajak bumi dan bangunan, subsidi pupuk dan benih, atau prioritas akses pada program-program pertanian pemerintah. Dengan adanya insentif ini, petani akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mempertahankan lahan pertaniannya, sehingga target ketahanan pangan daerah dapat tercapai, dan lahan-lahan subur tidak lagi berkurang karena alih fungsi lahan.

15. Peningkatan adopsi inovasi dan teknologi teknologi berbasis *smart farming*

    Modernisasi sektor pertanian berbasis smart farming diarahkan pada peningkatkan efisiensi serta produktivitas. Smart farming memanfaatkan teknologi digital dan data untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat, seperti penggunaan sensor untuk memantau kondisi tanah dan cuaca secara *real-time*, penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan penyemprotan presisi, serta aplikasi seluler untuk memonitor pertumbuhan tanaman. Dengan adopsi teknologi ini, petani dapat menghemat sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida, karena input diberikan sesuai kebutuhan yang spesifik. Selain itu, smart farming juga memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik dan hasil panen yang lebih stabil, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani dan keberlanjutan lingkungan.

16. Pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan

    Kebijakan ini diarahkan dalam mendukung peningkatan produksi dan peningkatan mutu tanaman hortikultura/perkebunan. Dalam sektor hortikultura, fokusnya adalah pada komoditas bernilai tinggi seperti sayuran terutama komoditas pengendali inflasi, buah-buahan dan tanaman hias. Upaya tersebut mencakup penerapan teknologi budidaya intensif dan ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas pascapanen dan pengemasan untuk memenuhi standar pasar. Sementara itu, pengembangan perkebunan

diarahkan pada komoditas strategis seperti kopi, kakao, cengkeh, kelapa, nilam, tembakau dll. Upayanya meliputi penambahan luas tanam, peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul dan peningkatan efisiensi lahan, pengelolaan opt tanaman, yang secara keseluruhan didukung oleh penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan industri pengolahan. Dengan demikian, pengembangan kedua sektor ini tidak hanya meningkatkan produksi namun meningkatkan pendapatan petani.

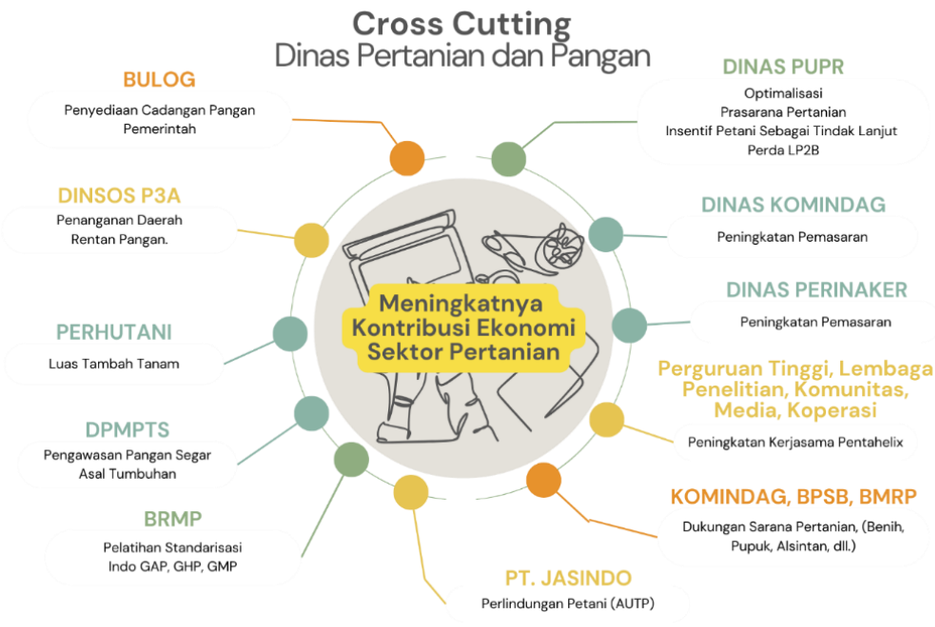
17. Peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan *e-commerce*/media sosial

    Peningkatan pemasaran melalui berbagai platform digital dan fisik merupakan strategi penting untuk memperluas jangkauan pasar produk pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan membangun citra positif komoditas lokal. Melalui pameran dan kontes, petani dapat mempromosikan produk mereka secara langsung, membangun jejaring bisnis, dan mendapatkan umpan balik dari konsumen. Sementara itu, pemanfaatan marketplace dan e-commerce membuka peluang pasar yang lebih luas, menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Petani atau kelompok tani dapat memanfaatkan platform seperti Tokopedia, Shopee, atau platform khusus pertanian untuk menjual produk secara efisien. Penggunaan media sosial juga menjadi alat yang efektif untuk membangun merek, berinteraksi langsung dengan pelanggan dan mempromosikan cerita di balik produk. Dengan mengintegrasikan semua saluran pemasaran ini, produk pertanian Indonesia dapat bersaing lebih kuat, baik di pasar domestik maupun internasional.

18. Peningkatan kerjasama pentahelix (Perguruan tinggi/Akademisi, Lembaga penelitian, Komunitas, Media, koperasi maupun lembaga swasta) yang diikat dengan MoU

    Peningkatan kerja sama pentahelix merupakan strategi fundamental untuk menciptakan ekosistem pertanian yang inovatif dan berkelanjutan. Model ini menyatukan lima pilar utama: Perguruan Tinggi/Akademisi sebagai sumber pengetahuan dan inovasi; Lembaga Penelitian untuk pengembangan teknologi dan riset terapan; Komunitas/Petani sebagai pelaku utama di lapangan; Media untuk publikasi dan edukasi; serta Koperasi dan Lembaga Swasta sebagai penggerak bisnis, permodalan, dan pasar. Dengan mengikat semua pihak ini melalui *Memorandum of Understanding* (MoU), kerja sama menjadi lebih terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini memastikan bahwa inovasi dari perguruan tinggi tidak hanya berhenti di laboratorium, melainkan dapat diimplementasikan langsung di lahan petani, didukung oleh pendanaan dan pemasaran dari sektor swasta, serta disebarluaskan secara efektif melalui media, yang pada akhirnya akan mempercepat transformasi pertanian ke arah yang lebih modern dan berdaya saing.

    Dalam pelaksanaan arah kebijakan, Dinas Pertanian dan Pangan tidak lepas dari sinergi dengan pihak lain yaitu dengan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga lain, bahu membahu mengedepankan semangat kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap unit memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan bersama, sehingga sinergi antar instansi mutlak diperlukan. Melalui kerja sama yang terarah dan terintegrasi, setiap program dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga mendorong inovasi dan solusi bagi masyarakat.



Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan yang ditempuh dalam periode Tahun 2025-2029 ke depan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian	1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Penguatan produksi tanaman pertanian, hortikultura, perkebunan secara terpadu dan berkelanjutan serta penguatan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal	- Penyediaan cadangan pangan pemerintah - Optimalisasi lumbung pangan dan infrastruktur kemandirian pangan - Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan rumah tangga - Peningkatan pengawasan keamanan pangan - Penanganan daerah rawan pangan - Penganekaragaman konsumsi pangan B2SA
	2. Meningkatnya kesejahteraan petani		- Pelatihan standarisasi IndoGAP GMP GHP - Peningkatan Luas Tambah Tanam - Dukungan sarana pra dan pasca panen (Benih, Pupuk, Alsintan, mesin perajang tembakau dll) - Optimalisasi prasarana pertanian (Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi Perkebunan, Irigasi Air Tanah, Pompa Air Tenaga Surya, Gcreenhouse,

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Dam Parit, Rumah Pengering Tembakau, Dam Parit, dll) - Pengembangan perlindungan petani melalui AUTP, SL OPT, SL PHT, SL Iklim, Gerakan Pengendalian OPT - Peningkatan SDM Petani miskin, peningkatan petani milenial dan kelembagaan petani - Pembentukan korporasi petani/BUMP - Insentif bagi petani sebagai tindak lanjut perda LP2B - Peningkatan adopsi inovasi dan teknologi berbasis - smart farming - Pengembangan tanaman hortikultura dan perkebunan - Peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan ecommerce/media sosial - Peningkatan kerjasama pentahelix (Perguruan tinggi/Akademisi, Lembaga penelitian, Komunitas, Media, koperasi maupun lembaga swasta yang diikat dengan MoU

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sebagai suatu langkah operasional dari perwujudan beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya dengan tetap memperhatikan perundang – undangan yang berlaku, memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 2850 Tahun 2025 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.53406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek akan dijelaskan dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, pelaksanaan program Dinas Pertanian dan Pangan juga berlandaskan pada Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Trenggalek, khususnya pada pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Arah kebijakan ini menekankan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat melalui modernisasi sistem produksi dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan diarahkan agar mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta mendorong pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik capaian kegiatan, masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.1. Uraian Program

Dalam perencanaannya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 9 Program yaitu :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

   Program ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian pangan melalui dukungan infrastruktur berupa infrastruktur dan sarana pendukung seperti *Bed Dryer,* Lantai Jemur, *Rice Milling Unit* (RMU), *Colour Sorter*, Sealer, Timbangan, pengukur kadar air dan kemasan.

   Indikator program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan adalah Persentase jumlah infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%).

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

   Program ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan konsumsi berbasis pangan lokal. Konsumsi singkong hanya 9,5 kg per kapita per tahun, ubi jalar 3 kg per kapita, sedangkan konsumsi beras mencapai 84 kg per kapita per tahun (Bapanas, 2025). Hal ini menunjukkan dominasi konsumsi nasi yang perlu segera diimbangi dengan edukasi serta penyediaan alternatif pangan berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi pangan diharapkan mampu mewujudkan sistem pangan nasional yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan. Indikator program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin) dan Persentase jumlah cadangan pangan (%). Saat ini skor PPH adalah 88,60, di tahun 2026 ditargetkan 88,75, tahun 2027 sebesar 88,90, tahun 2028 sebesar 89,05, tahun 2029 89,20 dan di akhir tahun renstra sebesar 89,35. Untuk persentase jumlah cadangan pangan, harus tersedia 100 persen untuk setiap tahunnya.

3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

   Program ini dimaksudkan untuk penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, pengelolaan cadangan pangan, mobilisasi pangan dari Daerah surplus ke defisit, pengembangan sistem peringatan dini, promosi konsumsi pangan lokal dan beragam, serta pemberian bantuan sosial bagi daerah rentan pangan. Indikator dari program penanganan kerawanan pangan adalah Persentase daerah rentan rawan pangan (%), dimana jumlah persentase desa/daerah rawan rentan ditargetkan sebesar 1,27% per tahunnya. Indikator ini menghitung jumlah desa/daerah rawan pangan

berdasarkan hasil analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan.

4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di masyarakat. Melalui program ini, PSAT yang beredar dilakukan pengawasan untuk memastikan keamanan pangan segar dan aman untuk dikonsumsi, bebas dari kontaminasi biologis, kimiawi, dan fisika (*Post Market* dan *Pre Market*). Indikator dari program pengawasan keamanan pangan ini yaitu Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%), dengan target sebesar 86,67% setiap tahunnya selama periode Renstra. Indikator ini untuk mengetahui jumlah pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana setiap tahunnya sebanyak 4 dokumen.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tugastugas administratif kantor atau organisasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan instansi. Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi meliputi Administrasi Keuangan, Administrasi Pendapatan, Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum. Selain itu juga fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah serta pengelolaan aset yang diperlukan untuk menunjang kinerja perangkat daerah sehingga perangkat daerah bisa mencapai tujuan organisasi. Indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi : 1). Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%) dengan target setiap tahunnya 100%; 2). Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) dengan target setiap tahunnya sebesar 100%; dan 3). Persentase nilai aset dalam kondisi baik dengan target 54% setiap tahun.

6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dimaksudkan untuk mendukung dan menyiapkan sarana usahatani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan diantaranya benih unggul, benih rendah emisi , pestisida, pestisida nabati, agensia hayati, pupuk, alat mesin pertanian yang meliputi alat olah tanah, alat tanam, *hand sprayer*, drone serta menekan losis panen dengan alat mesin pertanian modern pasca panen seperti *combine harvester*,

corn sealer, *cooper*, perajang tembakau, alat pasca panen kopi dll. Indikator program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian meliputi : 1). Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton); 2). Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton); dan 3). Peningkatan Produksi Perkebunan.

7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dimaksudkan untuk mendukung dan menyiapkan infrastruktur pertanian berupa Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi (Japrod), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Irigasi air tanah, Dam parit, Rumah pengering tembakau, *greenhouse*/*screenhouse*, dll, yang diharapkan mampu menekan biaya usaha tani, mempermudah akses sarana pertanian baik menuju lahan pertanian maupun dari lahan menuju pasar/mempermudah akses pemasaran hasil pertanian. Selain itu, juga pemberian insentif kepada petani dalam upaya pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian LP2B. Indikator program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian adalah Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha), dengan target setiap tahunnya yaitu 12.785 Ha selama periode Renstra.

8. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program ini dimaksudkan untuk perlindungan petani terhadap usahatani melalui Asuransi Usaha Tani, melalui sekolah lapangan organisme penganggu tanaman (SLOPT) tanaman pangan hortikultura perkebunan dan sekolah lapangan Iklim (SL Iklim) dimana hal ini sangat diperlukan petani agar mampu mengelola tanaman yang diusahakan dan perlindungan tanaman dari serangan organisme penggangu tanaman serta mitigasi iklim. Program ini dimaksudkan untuk Indikator program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian meliputi : 1). Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%); dan 2). Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%). Target dari kedua indikator ini sebesar 100% setiap tahunnya selama periode Renstra. Saat ini, luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian adalah 100%.

9. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yaitu petani dan penyuluh pertanian. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga

dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Dalam rangka peningkatan SDM petani, penyuluh pertanian sebagai pendamping dituntut kompetensinya, sehingga penyuluh harus meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kapabilitasnya. Program ini dimaksudkan untuk Indikator dari program penyuluhan pertanian meliputi : 1). Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan dengan target 100% setiap tahunnya: dan 2). Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi, dengan target 1,27%. Dimana saat ini jumlah Penyuluh Pertanian yaitu 130 orang dan Kelembagaan Petani saat ini sejumlah 1167 terdiri atas 802 Kelompok Tani, 208 Kelompok Wanita Tani dan 157 Gapoktan.

Tabel dibawah ini, uraian tentang rencana Program/ Kegiatan/Subkegiatan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					571.074.738,00		416.074.700,00		416.074.700,00		416.074.700,00		416.074.700,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					165.045.238,00		205.045.200,00		205.045.200,00		205.045.200,00		205.045.200,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%)	100	100	100	165.045.238,00	100	205.045.200,00	100	205.045.200,00	100	205.045.200,00	100	205.045.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					307.300.800,00		112.300.800,00		112.300.800,00		112.300.800,00		112.300.800,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	307.300.800,00	100	112.300.800,00	100	112.300.800,00	100	112.300.800,00	100	112.300.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	88,60	88,60	88,75		88,90		89,05		89,20		89,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					53.975.500,00		53.975.500,00		53.975.500,00		53.975.500,00		53.975.500,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1,27	1,27	1,27	53.975.500,00	1,27	53.975.500,00	1,27	53.975.500,00	0,64	53.975.500,00	0,64	53.975.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					44.753.200,00		44.753.200,00		44.753.200,00		44.753.200,00		44.753.200,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	86,67	86,67	44.753.200,00	86,67	44.753.200,00	86,67	44.753.200,00	86,67	44.753.200,00	86,67	44.753.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					37.996.754.288,00		33.725.270.600,00		33.719.123.900,00		33.712.929.700,00		33.834.382.000,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.654.198.341,00		25.653.372.200,00		25.647.225.500,00		25.641.031.300,00		25.762.483.600,00	
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	91,62	100	100	23.632.304.288,00	100	25.631.478.147,00	100	25.625.331.447,00	100	25.619.137.247,00	100	25.740.589.547,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	54	54	54		54		54		54		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	91,62	100	100	21.894.053,00	100	21.894.053,00	100	21.894.053,00	100	21.894.053,00	100	21.894.053,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	54	54	54		54		54		54		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.988.723.385,00		1.586.027.300,00		1.586.027.300,00		1.586.027.300,00		1.586.027.300,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat) (Ton)	10.809,22	3.418,05	3.424,89	1.681.650.000,00	3.431,74	1.163.944.330,00	3.438,60	1.163.944.330,00	3.445,48	1.163.944.330,00	3.452,37	1.163.944.330,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	475,67	475,67	476,62		477,57		478,53		479,49		480,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai) (Ton)	801,44	801,4	803		804,61		806,22		807,83		809,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ton)	88.175,99	11.869,23	11.892,97		11.916,75		11.940,59		11.964,47		11.988,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe) (Ton)	3.311,62	1.426,27	1.429,12		1.431,98		1.434,84		1.437,71		1.440,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis) (Ton)	24.295,90	2.947,54	2.953,44		2.959,34		2.965,26		2.971,19		2.977,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	1.434,53	308,83	309,45		310,07		310,69		311,31		311,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	1.069,32	1.069,32	1.074,67		1.080,04		1.085,44		1.090,87		1.096,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	8.421,39	8.421,39	8.438,23		8.455,11		8.472,02		8.488,96		8.505,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	364,67	616,83	618,06		619,30		622,40		625,51		628,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	1.237,72	1.237,72	1.262,47		1.287,72		1.313,48		1.339,75		1.366,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan	179,01	179,01	180,80		182,61		184,43		186,28		188,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(Tembakau) (Ton)													
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) (Ton)	116.240,26	116.240,26	117.983,86		119.753,62		121.549,92		123.373,17		125.223,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai) (Ton)	1.697,11	1.697,11	1.714,08		1.731,22		1.748,53		1.766,02		1.783,68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (Ton)	138.357,80	138.357,80	141.124,95		143.947,45		146.826,40		149.762,93		152.758,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu) (Ton)	179.774,82	179.774,82	183.370,31		187.037,72		190.778,47		194.594,04		198.485,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	1.434,53	308,83	309,45	307.073.385,00	310,07	422.082.970,00	310,69	422.082.970,00	311,31	422.082.970,00	311,93	422.082.970,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	1.069,32	1.069,32	1.074,67		1.080,04		1.085,44		1.090,87		1.096,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	8.421,39	8.421,39	8.438,23		8.455,11		8.472,02		8.488,96		8.505,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	364,67	616,83	618,06		619,30		622,40		625,51		628,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	1.237,72	1.237,72	1.262,47		1.287,72		1.313,48		1.339,75		1.366,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	179,01	179,01	180,80		182,61		184,43		186,28		188,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					11.021.275.262,00		4.662.106.700,00		4.662.106.700,00		4.662.106.700,00		4.662.106.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	12.785	12.785	12.785	11.021.275.262,00	12.785	4.662.106.700,00	12.785	4.662.106.700,00	12.785	4.662.106.700,00	12.785	4.662.106.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					149.051.300,00		149.051.300,00		149.051.300,00		149.051.300,00		149.051.300,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	149.051.300,00	100	149.051.300,00	100	149.051.300,00	100	149.051.300,00	100	149.051.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.183.506.000,00		1.674.713.100,00		1.674.713.100,00		1.674.713.100,00		1.674.713.100,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	1,27	1,27	1,91	1.183.506.000,00	2,55	1.674.713.100,00	3,18	1.674.713.100,00	3,82	1.674.713.100,00	4,46	1.674.713.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					**38.567.829.026,00**		**34.141.345.300,00**		**34.135.198.600,00**		**34.129.004.400,00**		**34.250.456.700,00**	

4.2. Uraian Kegiatan

Dalam perencanaannya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan, dengan 9 Program, 20 Kegiatan. Adapun 20 Kegiatan pada 9 Program adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

   Indikator program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan adalah Persentase jumlah infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%). Pada awal tahun 2025, Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CPBPD) sebanyak 94.172,84 kg beras. Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   1.1. **Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

      1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

      1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

   Indikator program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin) dan Persentase jumlah cadangan pangan (%). Saat ini skor PPH adalah 88,60, di tahun 2026 88,75, tahun 2027 sebesar 88,90, tahun 2028 sebesar 89,05, tahun 2029 89,20 dan di akhir tahun renstra sebesar 89,35. Untuk persentase jumlah cadangan pangan, harus tersedia 100 persen untuk setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   2.1. **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

      2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

      2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

      2.1.3. Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

   2.2. **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**

      2.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

   2.3. **Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

2.3.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

2.3.2. Sub Kegitan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Indikator dari program penanganan kerawanan pangan adalah Persentase daerah rentan rawan pangan (%), dimana jumlah persentase desa/daerah rawan rentan ditargetkan sebesar 1,27% per tahunnya. Indikator ini menghitung jumlah desa/daerah rawan pangan berdasarkan hasil analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan. Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

3.1. **Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

3.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

3.2. **Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

3.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Indikator dari program pengawasan keamanan pangan ini yaitu Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%), dengan target sebesar 86,67% setiap tahunnya selama periode Renstra. Indikator ini untuk mengetahui jumlah pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana setiap tahunnya sebanyak 4 dokumen. Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

4.1. **Kegiatan Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :**

4.1.1. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.2. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.3. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.4. Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi : 1). Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%) dengan target setiap tahunnya 100%; 2). Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) dengan target setiap tahunnya sebesar 100%; dan 3). Persentase nilai aset dalam kondisi baik dengan target 54% setiap tahun. Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

5.1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

5.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

5.3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

5.3.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

5.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

5.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

5.6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Indikator program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian meliputi: 1). Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton); 2). Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton); dan 3). Peningkatan Produksi Perkebunan. Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

6.1. **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

6.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

6.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

6.2. **Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

6.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Indikator program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian adalah Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha), dengan target setiap tahunnya yaitu 12.785 Ha selama periode Renstra. Berikut tabel kondisi jaringan irigasi tersier saat ini :

Uraian	Panjang (m)
Baik	56.544,82
Rusak Ringan	16.637,80
Rusak Sedang	42.907,00
Rusak Berat	64.565,90
Belum Terbangun	112.393,10
Panjang Total	293.048,62

Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

7.1. **Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**

7.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

7.1.2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

7.2. **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

7.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

7.2.2. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

7.2.3. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

7.2.4. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

8. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Indikator program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian meliputi : 1). Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%); dan 2). Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%). Target dari kedua indikator ini sebesar 100% setiap tahunnya selama periode Renstra. Saat ini, luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian adalah 1.030 Ha, dan target setiap tahunnya seluas 1.060 Ha.

Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

8.1. **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

8.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

8.1.2. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

9. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Indikator dari program penyuluhan pertanian meliputi : 1). Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan dengan target 100% setiap tahunnya: dan 2). Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi, dengan target 1,27%. Jumlah Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Petani saat ini yaitu :

No.	Uraian	Jumlah
1.	SDM Penyuluh Pertanian	130
2.	Kelembagaan Petani (Poktan, KWT, Gapoktan)	197

Dalam rangka mewujudkan program ini ditetapkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

9.1. **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

9.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

9.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

9.1.3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

9.1.4. Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

9.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

Berikut uraian Tujuan, Sasaran, Indikator serta Program Kegiatan/SubKegiatan Dinas Pertanian dan Pangan untuk periode Tahun 2025-2029:

Tabel 4.2
Uraian Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian				Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) (Milyar Rp.) ()		
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau			Indeks Ketahanan Pangan (poin)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tercapainya Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Meningkatnya kesejahteraan petani			Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terlaksananya Pembangunan Prasarana	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pertanian			
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan			Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai)		
					Nilai ratarata survey kepuasan masyarakatÂ (SKM) (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Administrasi Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjunga Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN							
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian UPT Taman Sains Teknologi Pertanian		Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
		Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam perencanaannya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dengan 9 Program, 20 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				571.074.738		416.074.700		416.074.700		416.074.700		416.074.700		
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				165.045.238		205.045.200		205.045.200		205.045.200		205.045.200		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%)	100	100	165.045.238	100	205.045.200	100	205.045.200	100	205.045.200	100	205.045.200	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				165.045.238		205.045.200		205.045.200		205.045.200		205.045.200		
Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	165.045.238	1	205.045.200	1	205.045.200	1	205.045.200	1	205.045.200		
	Jumlah Infrastruktur Pendukung	8	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)													
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				160.816.000		202.000.000		202.000.000		202.000.000		202.000.000		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	8	2	160.816.000	2	202.000.000	2	202.000.000	2	202.000.000	2	202.000.000		
2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				4.229.238		3.045.200		3.045.200		3.045.200		3.045.200		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	4.229.238	1	3.045.200	1	3.045.200	1	3.045.200	1	3.045.200		
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				307.300.800		112.300.800		112.300.800		112.300.800		112.300.800		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	88,6	88,75	307.300.800	88,9	112.300.800	89,05	112.300.800	89,2	112.300.800	89,35	112.300.800	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				68.791.595		55.791.595		55.791.595		55.791.595		55.791.595		
Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	50	68.791.595	50	55.791.595	50	55.791.595	50	55.791.595	50	55.791.595		
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000		
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				37.882.629		24.882.629		24.882.629		24.882.629		24.882.629		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan	1	1	37.882.629	1	24.882.629	1	24.882.629	1	24.882.629	1	24.882.629		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				5.908.966		5.908.966		5.908.966		5.908.966		5.908.966		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	5.908.966	1	5.908.966	1	5.908.966	1	5.908.966	1	5.908.966		
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				0		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	0	0	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000		
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	0	0	0	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000		
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				238.509.205		43.509.205		43.509.205		43.509.205		43.509.205		
Tercapainya Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	238.509.205	1	43.509.205	1	43.509.205	1	43.509.205	1	43.509.205		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				5.133.682		5.133.682		5.133.682		5.133.682		5.133.682		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	5.133.682	1	5.133.682	1	5.133.682	1	5.133.682	1	5.133.682		
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				233.375.523		38.375.523		38.375.523		38.375.523		38.375.523		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	233.375.523	1	38.375.523	1	38.375.523	1	38.375.523	1	38.375.523		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				53.975.500		53.975.500		53.975.500		53.975.500		53.975.500		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1,27	1,27	53.975.500	1,27	53.975.500	1,27	53.975.500	0,64	53.975.500	0,64	53.975.500	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Ketahanan Pangan Kecamatan														
Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				3.975.500		3.975.500		3.975.500		3.975.500		3.975.500		
Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	3.975.500	1	3.975.500	1	3.975.500	1	3.975.500	1	3.975.500		
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				3.975.500		3.975.500		3.975.500		3.975.500		3.975.500		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	3.975.500	1	3.975.500	1	3.975.500	1	3.975.500	1	3.975.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				44.753.200		44.753.200		44.753.200		44.753.200		44.753.200		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	86,67	44.753.200	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				44.753.200		44.753.200		44.753.200		44.753.200		44.753.200		
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	12	44.753.200	12	44.753.200	12	44.753.200	12	44.753.200	12	44.753.200		
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				14.130.000		14.130.000		14.130.000		14.130.000		14.130.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	12	14.130.000	12	14.130.000	12	14.130.000	12	14.130.000	12	14.130.000		
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				3.395.250		3.395.250		3.395.250		3.395.250		3.395.250		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	4	5	3.395.250	5	3.395.250	5	3.395.250	5	3.395.250	5	3.395.250		
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				25.336.900		25.336.900		25.336.900		25.336.900		25.336.900		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	3	1	25.336.900	1	25.336.900	1	25.336.900	1	25.336.900	1	25.336.900		
2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1.891.050		1.891.050		1.891.050		1.891.050		1.891.050		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas	1	1	1.891.050	1	1.891.050	1	1.891.050	1	1.891.050	1	1.891.050		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan mutu pangan segar asal tumbuhan	keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)													
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				37.996.754.288		33.725.270.600		33.719.123.900		33.712.929.700		33.834.382.000		
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.654.198.341		25.653.372.200		25.647.225.500		25.641.031.300		25.762.483.600		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	54	54	23.632.304.288	54	25.631.478.147	54	25.625.331.447	54	25.619.137.247	54	25.740.589.547	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	91,62	100		100		100		100		100			
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				198.000.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	8	10	198.000.000	10	198.000.000	10	198.000.000	10	198.000.000	10	198.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	8		8		8		8		8			
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	8	17.000.000	8	17.000.000	8	17.000.000	8	17.000.000	8	17.000.000		
3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				181.000.000		181.000.000		181.000.000		181.000.000		181.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	10	181.000.000	10	181.000.000	10	181.000.000	10	181.000.000	10	181.000.000		
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.554.141.428		24.543.742.198		24.537.595.498		24.531.401.298		24.652.853.598		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	22.554.141.428	1	24.543.742.198	1	24.537.595.498	1	24.531.401.298	1	24.652.853.598		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	203	259		250		250		250		250			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.499.223.330		24.488.824.100		24.482.677.400		24.476.483.200		24.597.935.500		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	203	259	22.499.223.330	250	24.488.824.100	250	24.482.677.400	250	24.476.483.200	250	24.597.935.500		
3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52.414.000		52.414.000		52.414.000		52.414.000		52.414.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	52.414.000	1	52.414.000	1	52.414.000	1	52.414.000	1	52.414.000		
3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/				2.504.098		2.504.098		2.504.098		2.504.098		2.504.098		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	2.504.098	1	2.504.098	1	2.504.098	1	2.504.098	1	2.504.098		
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.196.627		108.021.069		58.021.069		108.021.069		108.021.069		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Administrasi Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	220.196.627	12	108.021.069	12	58.021.069	12	108.021.069	12	108.021.069		
3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.196.627		108.021.069		58.021.069		108.021.069		108.021.069		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	220.196.627	12	108.021.069	12	58.021.069	12	108.021.069	12	108.021.069		
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.000.000		56.000.000		356.000.000		56.000.000		56.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjunga Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	31.000.000	1	56.000.000	1	356.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Disediakan (Unit)													
3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	31.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000		
3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		300.000.000		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0		
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.890.220		382.638.867		332.638.867		382.638.867		382.638.867		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	230.890.220	12	382.638.867	12	332.638.867	12	382.638.867	12	382.638.867		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Disediakan (Laporan)													
3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.890.220		230.890.220		230.890.220		230.890.220		230.890.220		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	230.890.220	12	230.890.220	12	230.890.220	12	230.890.220	12	230.890.220		
3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		90.780.000		40.780.000		90.780.000		90.780.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	0	12	90.780.000	12	40.780.000	12	90.780.000	12	90.780.000		
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		60.968.647		60.968.647		60.968.647		60.968.647		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	0	12	60.968.647	12	60.968.647	12	60.968.647	12	60.968.647		
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				398.076.013		328.076.013		128.076.013		328.076.013		328.076.013		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	398.076.013	5	328.076.013	5	128.076.013	5	328.076.013	4	328.076.013		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6		6		6		6		6			
3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.720.663		57.720.663		57.720.663		57.720.663		57.720.663		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	57.720.663	5	57.720.663	5	57.720.663	5	57.720.663	4	57.720.663		
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.531.419		22.531.419		22.531.419		22.531.419		22.531.419		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	22.531.419	6	22.531.419	6	22.531.419	6	22.531.419	6	22.531.419		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				317.823.931		247.823.931		47.823.931		247.823.931		247.823.931		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	317.823.931	2	247.823.931	2	47.823.931	2	247.823.931	2	247.823.931		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	54	54	21.894.053	54	21.894.053	54	21.894.053	54	21.894.053	54	21.894.053	2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (%)	91,62	100		100		100		100		100			
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.023.840		8.023.840		8.023.840		8.023.840		8.023.840		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	8.023.840	6	8.023.840	6	8.023.840	6	8.023.840	6	8.023.840		
3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.023.840		8.023.840		8.023.840		8.023.840		8.023.840		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	8.023.840	6	8.023.840	6	8.023.840	6	8.023.840	6	8.023.840		
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				13.870.213		13.870.213		13.870.213		13.870.213		13.870.213		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	13.870.213	5	13.870.213	5	13.870.213	5	13.870.213	5	13.870.213		
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.870.213		13.870.213		13.870.213		13.870.213		13.870.213		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	13.870.213	5	13.870.213	5	13.870.213	5	13.870.213	5	13.870.213		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.988.723.385		1.586.027.300		1.586.027.300		1.586.027.300		1.586.027.300		
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ton)	88.175,99	11.892,97	1.681.650.000	11.916,75	1.163.944.330	11.940,59	1.163.944.330	11.964,47	1.163.944.330	11.988,4	1.163.944.330	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai) (Ton)	801,44	803		804,61		806,22		807,83		809,45			
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	475,67	476,62		477,57		478,53		479,49		480,45			
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat) (Ton)	10.809,22	3.424,89		3.431,74		3.438,6		3.445,48		3.452,37			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	1.069,32	1.074,67		1.080,04		1.085,44		1.090,87		1.096,32			
	Peningkatan Produksi	8.421,39	8.438,23		8.455,11		8.472,02		8.488,96		8.505,94			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perkebunan (Kelapa) (Ton)													
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	364,67	618,06		619,3		622,4		625,51		628,64			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	1.237,72	1.262,47		1.287,72		1.313,48		1.339,75		1.366,54			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	179,01	180,8		182,61		184,43		186,28		188,14			
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) (Ton)	116.240,26	117.983,86		119.753,62		121.549,92		123.373,17		125.223,77			
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai) (Ton)	1.697,11	1.714,08		1.731,22		1.748,53		1.766,02		1.783,68			
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (Ton)	138.357,8	141.124,95		143.947,45		146.826,4		149.762,93		152.758,19			
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu) (Ton)	179.774,82	183.370,31		187.037,72		190.778,47		194.594,04		198.485,92			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	1.434,53	309,45		310,07		310,69		311,31		311,93			
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis) (Ton)	24.295,9	2.953,44		2.959,34		2.965,26		2.971,19		2.977,13			
	Peningkatan Produksi	3.311,62	1.429,12		1.431,98		1.434,84		1.437,71		1.440,59			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hortikultura (Jahe) (Ton)													
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				1.681.650.000		1.163.944.330		1.163.944.330		1.163.944.330		1.163.944.330		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1.681.650.000	1	1.163.944.330	1	1.163.944.330	1	1.163.944.330	1	1.163.944.330		
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.531.650.000		936.395.248		936.395.248		936.395.248		936.395.248		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1.531.650.000	1	936.395.248	1	936.395.248	1	936.395.248	1	936.395.248		
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				150.000.000		227.549.082		227.549.082		227.549.082		227.549.082		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	1	1	150.000.000	1	227.549.082	1	227.549.082	1	227.549.082	1	227.549.082		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pertanian (Laporan)													
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	1.237,72	1.262,47	307.073.385	1.287,72	422.082.970	1.313,48	422.082.970	1.339,75	422.082.970	1.366,54	422.082.970	2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	1.434,53	309,45		310,07		310,69		311,31		311,93			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	364,67	618,06		619,3		622,4		625,51		628,64			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	8.421,39	8.438,23		8.455,11		8.472,02		8.488,96		8.505,94			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	1.069,32	1.074,67		1.080,04		1.085,44		1.090,87		1.096,32			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	179,01	180,8		182,61		184,43		186,28		188,14			
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				78.356.320		183.356.320		183.356.320		183.356.320		183.356.320		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian lingkup UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0	78.356.320	1	183.356.320	1	183.356.320	1	183.356.320	1	183.356.320		
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Spesifik Lokasi (Laporan)													
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				78.356.320		63.356.320		63.356.320		63.356.320		63.356.320		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	78.356.320	1	63.356.320	1	63.356.320	1	63.356.320	1	63.356.320		
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0	0	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				228.717.065		238.726.650		238.726.650		238.726.650		238.726.650		
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	228.717.065	1	238.726.650	1	238.726.650	1	238.726.650	1	238.726.650		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				228.717.065		238.726.650		238.726.650		238.726.650		238.726.650		
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Laporan)	1	1	228.717.065	1	238.726.650	1	238.726.650	1	238.726.650	1	238.726.650		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				11.021.275.262		4.662.106.700		4.662.106.700		4.662.106.700		4.662.106.700		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	12.785	12.785	11.021.275.262	12.785	4.662.106.700	12.785	4.662.106.700	12.785	4.662.106.700	12.785	4.662.106.700	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian				1.256.275.262		2.017.000.000		2.017.000.000		2.017.000.000		2.017.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	12.785	12.785	1.256.275.262	12.785	2.017.000.000	12.785	2.017.000.000	12.785	2.017.000.000	12.785	2.017.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	12		12		12		12		12			
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1.217.350.000		1.517.000.000		1.517.000.000		1.517.000.000		1.517.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	2	12	1.217.350.000	12	1.517.000.000	12	1.517.000.000	12	1.517.000.000	12	1.517.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pendukung Pertanian Lainnya	Pertanian Lainnya (Laporan)													
3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				38.925.262		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	12.785	12.785	38.925.262	12.785	500.000.000	12.785	500.000.000	12.785	500.000.000	12.785	500.000.000		
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian				9.765.000.000		2.645.106.700		2.645.106.700		2.645.106.700		2.645.106.700		
Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	0	9.765.000.000	3	2.645.106.700	0	2.645.106.700	0	2.645.106.700	0	2.645.106.700		
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	19		7		7		7		7			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	44	40		17		21		21		21			
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	5		2		0		0		0			
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				6.315.000.000		1.745.106.700		2.145.106.700		2.145.106.700		2.145.106.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	44	40	6.315.000.000	17	1.745.106.700	21	2.145.106.700	21	2.145.106.700	21	2.145.106.700		
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				0		200.000.000		0		0		0		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	0	0	3	200.000.000	0	0	0	0	0	0		
3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				700.000.000		200.000.000		0		0		0		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	5	700.000.000	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0		
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				2.750.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	9	19	2.750.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000		
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN				149.051.300		149.051.300		149.051.300		149.051.300		149.051.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%)	100	100	149.051.300	100	149.051.300	100	149.051.300	100	149.051.300	100	149.051.300	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100		100		100		100		100			
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				149.051.300		149.051.300		149.051.300		149.051.300		149.051.300		
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	1.000	1.000	149.051.300	1.000	149.051.300	1.000	149.051.300	1.000	149.051.300	1.000	149.051.300		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	30	60		60		60		60		60			
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				111.806.296		111.806.296		111.806.296		111.806.296		111.806.296		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	30	60	111.806.296	60	111.806.296	60	111.806.296	60	111.806.296	60	111.806.296		
3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				37.245.004		37.245.004		37.245.004		37.245.004		37.245.004		
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	1.000	1.000	37.245.004	1.000	37.245.004	1.000	37.245.004	1.000	37.245.004	1.000	37.245.004		
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.183.506.000		1.674.713.100		1.674.713.100		1.674.713.100		1.674.713.100		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	1,27	1,91	1.183.506.000	2,55	1.674.713.100	3,18	1.674.713.100	3,82	1.674.713.100	4,46	1.674.713.100	2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.183.506.000		1.674.713.100		1.674.713.100		1.674.713.100		1.674.713.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	130	130	1.183.506.000	130	1.674.713.100	130	1.674.713.100	130	1.674.713.100	130	1.674.713.100		
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	20	0		20		20		20		20			
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	6	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	197	229		229		229		229		229			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	8	0		6		6		6		6			
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				0		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	20	0	0	20	140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000		
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan				566.000.000		694.713.100		694.713.100		694.713.100		694.713.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Petani di Kecamatan dan Desa														
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	197	229	566.000.000	229	694.713.100	229	694.713.100	229	694.713.100	229	694.713.100		
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	8	0	0	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000		
3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				607.506.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	130	130	607.506.000	130	50.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000		
3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				10.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	6	2	10.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut adalah Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pertanidan dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah :

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Trenggalek

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**TGX Rantai Nilai** Proyek Strategis: Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan
			2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
			2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**TGX Investasi Hijau** Proyek Strategis: Fasilitasi perijinan berusaha pertanian, perikanan, dan peternakan di OSS
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
4.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**TGX Rantai Nilai** Proyek Strategis: Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
5.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	**Tgx Ekonomi Karbon** Proyek Strategis: Percepatan penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon (NEK)
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
6.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**TGX Rantai Nilai** Proyek Strategis: Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
2.09.3.27.0.00.02.0001 - UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN				
7.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian UPT Taman Sains Teknologi Pertanian	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tgx Ekonomi Karbon** Proyek Strategis: Percepatan penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon (NEK)
			3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Trenggalek

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN									
2.	Indeks Ketahanan Pangan	poin	83,17	83,37	83,57	83,77	83,97	84,17	84,37	
3.	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	89,49	89,64	89,79	89,94	90,09	90,24	90,39	
4.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	103,65	104,15	104,65	105,15	105,65	106,15	106,65	
5.	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM)	Indeks	99,74	99,77	99,78	99,79	99,80	99,81	99,82	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan dan kesejahteraan

masyarakat secara luas. Dengan menggunakan IKK, Dinas Pertanian dan Pangan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Trenggalek

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Indeks Ketahanan Pangan	positif	poin	83,17	83,37	83,57	83,77	83,97	84,17	84,37	
3.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
4.	Nilai Tukar Petani (NTP)	positif	Indeks	103,65	104,15	104,65	105,15	105,65	106,15	106,65	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek. Penyusunannya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan bagi pemerintah dan masyarakat, penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara transparan dan partisipatif guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan, yang selanjutnya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan.

Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi pada:

- Peningkatan ketahanan pangan;
- Peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang akan diimplementasikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029.

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan pertanian dan pangan yang telah dirancang sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat memberikan kontribusi produktif dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara konsisten, dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004

PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

